



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82 /PMK.03/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 9/PMK.03/2021 TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK
TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* masih diperlukan pemberian insentif perpajakan, sehingga diperlukan perpanjangan jangka waktu pemberian insentif pajak dengan memperhatikan kapasitas fiskal untuk mendukung program penguatan kesehatan masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional;
- b. bahwa pemberian insentif perpajakan harus diberikan secara selektif dengan prioritas kepada sektor tertentu yang tertahan dan perlu lebih didukung laju pemulihannya, sehingga dilakukan penyesuaian kriteria penerima insentif;
- c. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* belum menampung kebutuhan perpanjangan jangka waktu pemberian insentif pajak dan penyesuaian kriteria penerima insentif, sehingga perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17C ayat (7) dan Pasal 17D ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Pasal 9 ayat (4d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6214);
11. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 9/PMK.03/2021 TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Jangka waktu pemberian insentif:
 - a. PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
 - b. PPh final ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3);
 - c. PPh final ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3);
 - d. pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
 - e. pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2),
diberikan untuk Masa Pajak Januari 2021 sampai dengan Masa Pajak Juni 2021.
- (2) Jangka waktu pemberian insentif pembebasan

dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2021.

- (3) Jangka waktu pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang sampai dengan Masa Pajak Desember 2021.
- (4) Jangka waktu pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
- (5) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) hanya berlaku untuk Pemberi Kerja dan/atau Wajib Pajak yang:
 - a. memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran:
 1. kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak Yang Mendapatkan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah;
 2. kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pembebasan PPh Pasal 22 Impor;
 3. kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25; atau
 4. kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran PPN;yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - b. Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018; dan/atau
 - c. Wajib Pajak Penerima P3-TGAI.

2. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 19A dan Pasal 19B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

- (1) Pemberi Kerja dan/atau Wajib Pajak dapat memanfaatkan insentif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 10 ayat (3), dan/atau Pasal 12 ayat (1) dengan:
 - a. menyampaikan Pemberitahuan Pemanfaatan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25; dan/atau
 - b. mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor; menggunakan formulir melalui laman www.pajak.go.id.
- (2) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau Pemotong Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) untuk memanfaatkan insentif, harus menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah menggunakan formulir melalui laman www.pajak.go.id.
- (3) Pemberi Kerja dan/atau Wajib Pajak yang telah menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 atas:
 - a. PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah; dan/atau
 - b. pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25;harus menyampaikan kembali pemberitahuan untuk dapat memanfaatkan insentif pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan/atau Pasal 12 ayat (1) dengan menggunakan formulir melalui laman www.pajak.go.id.

- (4) Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 Impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 harus menyampaikan kembali permohonan untuk dapat memanfaatkan insentif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dengan menggunakan formulir melalui laman www.pajak.go.id.
- (5) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19B

- (1) Pemberi Kerja dan/atau Wajib Pajak dapat memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan/atau insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) sejak Masa Pajak Juli 2021 dengan menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah dan/atau pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021.
- (2) Pemberi Kerja, Wajib Pajak, dan/atau Pemotong Pajak yang telah menyampaikan laporan realisasi dan/atau laporan realisasi pembetulan pemanfaatan insentif:
 - a. PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);

b. PPh final ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3); dan/atau

c. PPh final ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3);

dapat menyampaikan pembetulan laporan realisasi Masa Pajak Januari 2021 sampai dengan Masa Pajak Juni 2021 paling lambat tanggal 31 Oktober 2021.

3. Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2021

KEPALA BADAN
PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 743

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH
NIP 19730213-199703 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 82/PMK.03/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 9/PMK.03/2021 TENTANG INSENTIF PAJAK
UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI CORONA
VIRUS DISEASE 2019

INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019

A. KODE KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN
INSENTIF PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH

| NO. | KODE | NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA |
|-----|-------|---|
| 1 | 01111 | PERTANIAN TANAMAN JAGUNG |
| 2 | 01112 | PERTANIAN TANAMAN GANDUM |
| 3 | 01113 | PERTANIAN TANAMAN KEDELAI |
| 4 | 01114 | PERTANIAN TANAMAN KACANG TANAH |
| 5 | 01115 | PERTANIAN TANAMAN KACANG HIJAU |
| 6 | 01120 | PERTANIAN PADI |
| 7 | 01132 | PERTANIAN TANAMAN HORTIKULTURA BUAH |
| 8 | 01133 | PERTANIAN TANAMAN HORTIKULTURA SAYURAN BUAH |
| 9 | 01134 | PERTANIAN TANAMAN HORTIKULTURA SAYURAN UMBI |
| 10 | 01135 | PERTANIAN TANAMAN UMBI-UMBIA PALAWIJA |
| 11 | 01136 | PERTANIAN TANAMAN JAMUR |
| 12 | 01139 | PERTANIAN TANAMAN HORTIKULTURA SAYURAN LAINNYA |
| 13 | 01140 | PERKEBUNAN TEBU |
| 14 | 01150 | PERKEBUNAN TEMBAKAU |
| 15 | 01193 | PERTANIAN TANAMAN BUNGA |
| 16 | 01194 | PERTANIAN PEMBIBITAN TANAMAN BUNGA |
| 17 | 01220 | PERTANIAN BUAH-BUAHAN TROPIS |
| 18 | 01230 | PERTANIAN BUAH JERUK |
| 19 | 01261 | PERKEBUNAN BUAH KELAPA |
| 20 | 01262 | PERKEBUNAN BUAH KELAPA SAWIT |
| 21 | 01269 | PERKEBUNAN TANAMAN BUAH OLEAGINOUS LAINNYA |
| 22 | 01270 | PERTANIAN TANAMAN UNTUK BAHAN MINUMAN |
| 23 | 01281 | PERKEBUNAN LADA |
| 24 | 01282 | PERKEBUNAN CENGKEH |
| 25 | 01284 | PERKEBUNAN TANAMAN AROMATIK/PENYEGAR |
| 26 | 01285 | PERTANIAN TANAMAN OBAT ATAU BIOFARMAKA RIMPANG |
| 27 | 01286 | PERTANIAN TANAMAN OBAT ATAU BIOFARMAKA NON RIMPANG |
| 28 | 01289 | PERTANIAN TANAMAN REMPAH-REMPAH, AROMATIK/PENYEGAR, NARKOTIK DAN OBAT LAINNYA |
| 29 | 01291 | PERKEBUNAN KARET DAN TANAMAN PENGHASIL GETAH LAINNYA |
| 30 | 01301 | PERTANIAN TANAMAN HIAS BUKAN TANAMAN BUNGA |
| 31 | 01302 | PERTANIAN PENGEMBANGBIAKAN TANAMAN HORTIKULTURA LAINNYA BUKAN BUNGA |

| NO. | KODE | NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA |
|-----|-------|---|
| 32 | 01411 | PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI POTONG |
| 33 | 01412 | PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI PERAH |
| 34 | 01413 | PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KERBAU POTONG |
| 35 | 01461 | PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA AYAM RAS PEDAGING |
| 36 | 01462 | PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA AYAM RAS PETELUR |
| 37 | 01611 | JASA PENGOLAHAN LAHAN |
| 38 | 01612 | JASA PEMUPUKAN, PENANAMAN BIBIT/BENIH DAN PENGENDALIAN JASAD PENGGANGGU |
| 39 | 01613 | JASA PEMANENAN |
| 40 | 01614 | JASA PENYEMPROTAN DAN PENYERBUKAN MELALUI UDARA |
| 41 | 01619 | JASA PENUNJANG PERTANIAN LAINNYA |
| 42 | 01621 | JASA PELAYANAN KESEHATAN TERNAK |
| 43 | 01622 | JASA PEMACEKAN TERNAK |
| 44 | 01623 | JASA PENETASAN TELUR |
| 45 | 01629 | JASA PENUNJANG PETERNAKAN LAINNYA |
| 46 | 01630 | JASA PASCA PANEN |
| 47 | 01702 | PENANGKARAN SATWA LIAR |
| 48 | 02111 | PENGUSAHAAN HUTAN JATI |
| 49 | 02112 | PENGUSAHAAN HUTAN PINUS |
| 50 | 02113 | PENGUSAHAAN HUTAN MAHONI |
| 51 | 02114 | PENGUSAHAAN HUTAN SONOKELING |
| 52 | 02115 | PENGUSAHAAN HUTAN ALBASIA/JEUNJING |
| 53 | 02116 | PENGUSAHAAN HUTAN CENDANA |
| 54 | 02117 | PENGUSAHAAN HUTAN AKASIA |
| 55 | 02118 | PENGUSAHAAN HUTAN EKALIPTUS |
| 56 | 02119 | PENGUSAHAAN HUTAN LAINNYA |
| 57 | 02120 | PENGUSAHAAN HUTAN ALAM |
| 58 | 02131 | PENGUSAHAAN ROTAN |
| 59 | 02132 | PENGUSAHAAN GETAH PINUS |
| 60 | 02133 | PENGUSAHAAN DAUN KAYU PUTIH |
| 61 | 02134 | PENGUSAHAAN BAMBU |
| 62 | 02135 | PENGUSAHAAN DAMAR |
| 63 | 02136 | PENGUSAHAAN GAHARU |
| 64 | 02139 | PENGUSAHAAN HUTAN BUKAN KAYU LAINNYA |
| 65 | 02301 | PEMUNGUTAN GETAH KARET |
| 66 | 02302 | PEMUNGUTAN ROTAN |
| 67 | 02303 | PEMUNGUTAN GETAH PINUS |
| 68 | 02304 | PEMUNGUTAN DAUN KAYU PUTIH |
| 69 | 02305 | PEMUNGUTAN KOKON/KEPOMPONG ULAT SUTERA |
| 70 | 02306 | PEMUNGUTAN DAMAR |
| 71 | 02307 | PEMUNGUTAN MADU |
| 72 | 02308 | PEMUNGUTAN BAMBU |
| 73 | 02309 | PEMUNGUTAN BUKAN KAYU LAINNYA |
| 74 | 02401 | JASA KEHUTANAN BIDANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN |
| 75 | 02402 | JASA KEHUTANAN BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM |
| 76 | 02403 | JASA KEHUTANAN BIDANG REHABILITASI LAHAN DAN KEHUTANAN SOSIAL |
| 77 | 02409 | JASA PENUNJANG KEHUTANAN LAINNYA |
| 78 | 03111 | PENANGKAPAN PISCES/IKAN BERSIRIP DI LAUT |
| 79 | 03112 | PENANGKAPAN CRUSTACEA DI LAUT |
| 80 | 03113 | PENANGKAPAN MOLLUSCA DI LAUT |
| 81 | 03114 | PENANGKAPAN/PENGAMBILAN ALGAE (TUMBUHAN) DI LAUT |
| 82 | 03115 | PENANGKAPAN/PENGAMBILAN BENIH IKAN LAUT |
| 83 | 03116 | PENANGKAPAN ECHINODERMATA DI LAUT |
| 84 | 03117 | PENANGKAPAN COELENTERATA DI LAUT |
| 85 | 03118 | PENANGKAPAN IKAN HIAS LAUT |
| 86 | 03119 | PENANGKAPAN BIOTA AIR LAINNYA DI LAUT |

| NO. | KODE | NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA |
|-----|-------|--|
| 87 | 03121 | PENANGKAPAN PISCES/IKAN BERSIRIP DI PERAIRAN UMUM |
| 88 | 03122 | PENANGKAPAN CRUSTACEA DI PERAIRAN UMUM |
| 89 | 03123 | PENANGKAPAN MOLLUSCA DI PERAIRAN UMUM |
| 90 | 03124 | PENANGKAPAN/PENGAMBILAN ALGAE DI PERAIRAN UMUM |
| 91 | 03125 | PENANGKAPAN/PENGAMBILAN INDUK/BENIH IKAN DI PERAIRAN UMUM |
| 92 | 03129 | PENANGKAPAN BIOTA AIR LAINNYA DI PERAIRAN UMUM |
| 93 | 03131 | JASA SARANA PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN DI LAUT |
| 94 | 03132 | JASA PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN DI LAUT |
| 95 | 03133 | JASA PASCA PANEN PENANGKAPAN IKAN DI LAUT |
| 96 | 03141 | JASA SARANA PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN UMUM |
| 97 | 03142 | JASA PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN UMUM |
| 98 | 03143 | JASA PASCA PANEN PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN UMUM |
| 99 | 03211 | PEMBESARAN IKAN LAUT |
| 100 | 03212 | PEMBENIHAN IKAN LAUT |
| 101 | 03213 | BUDIDAYA IKAN HIAS LAUT |
| 102 | 03214 | BUDIDAYA KARANG (CORAL) |
| 103 | 03221 | PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI KOLAM |
| 104 | 03222 | BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR DI KARAMBA JARING APUNG |
| 105 | 03223 | PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI KARAMBA |
| 106 | 03224 | PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI SAWAH |
| 107 | 03225 | BUDIDAYA IKAN HIAS AIR TAWAR |
| 108 | 03226 | PEMBENIHAN IKAN AIR TAWAR |
| 109 | 03231 | JASA SARANA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN LAUT |
| 110 | 03232 | JASA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN LAUT |
| 111 | 03241 | JASA SARANA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN DI AIR TAWAR |
| 112 | 03242 | JASA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN DI AIR TAWAR |
| 113 | 03243 | JASA PASCA PANEN BUDIDAYA IKAN DI AIR TAWAR |
| 114 | 03251 | PEMBESARAN IKAN AIR PAYAU |
| 115 | 03252 | PEMBENIHAN IKAN AIR PAYAU |
| 116 | 03261 | JASA SARANA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU |
| 117 | 03262 | JASA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU |
| 118 | 03263 | JASA PASCA PANEN BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU |
| 119 | 05101 | PERTAMBANGAN BATU BARA |
| 120 | 06100 | PERTAMBANGAN MINYAK BUMI |
| 121 | 06201 | PERTAMBANGAN GAS ALAM |
| 122 | 06202 | PENGUSAHAAN TENAGA PANAS BUMI |
| 123 | 07101 | PERTAMBANGAN PASIR BESI |
| 124 | 07102 | PERTAMBANGAN BIJIH BESI |
| 125 | 07291 | PERTAMBANGAN BIJIH TIMAH |
| 126 | 07292 | PERTAMBANGAN BIJIH TIMAH HITAM |
| 127 | 07293 | PERTAMBANGAN BIJIH BAUKSIT |
| 128 | 07294 | PERTAMBANGAN BIJIH TEMBAGA |
| 129 | 07295 | PERTAMBANGAN BIJIH NIKEL |
| 130 | 07296 | PERTAMBANGAN BIJIH MANGAN |
| 131 | 07299 | PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN LAINNYA YANG TIDAK MENGANDUNG BIJIH BESI |
| 132 | 07301 | PERTAMBANGAN EMAS DAN PERAK |
| 133 | 07309 | PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM MULIA LAINNYA |
| 134 | 08999 | PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA YTDL |
| 135 | 09100 | JASA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM |
| 136 | 09900 | JASA PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA |
| 137 | 10110 | KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING BUKAN UNGGAS |
| 138 | 10120 | KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING UNGGAS |
| 139 | 10130 | INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN PRODUK DAGING DAN DAGING UNGGAS |
| 140 | 10211 | INDUSTRI PENGGARAMAN/PENGERINGAN IKAN |
| 141 | 10212 | INDUSTRI PENGASAPAN/PEMANGGANGAN IKAN |

| NO. | KODE | NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA |
|-----|-------|---|
| 142 | 10213 | INDUSTRI PEMBEKUAN IKAN |
| 143 | 10214 | INDUSTRI PEMINDANGAN IKAN |
| 144 | 10215 | INDUSTRI PERAGIAN/FERMENTASI IKAN |
| 145 | 10216 | INDUSTRI BERBASIS DAGING LUMATAN DAN SURIMI |
| 146 | 10217 | INDUSTRI PENDINGINAN/PENGESAN IKAN |
| 147 | 10219 | INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA UNTUK IKAN |
| 148 | 10221 | INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DAN BIOTA AIR (BUKAN UDANG) DALAM KALENG |
| 149 | 10222 | INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN UDANG DALAM KALENG |
| 150 | 10291 | INDUSTRI PENGGARAMAN/PENGERINGAN BIOTA AIR LAINNYA |
| 151 | 10292 | INDUSTRI PENGASAPAN/PEMANGGANGAN BIOTA AIR LAINNYA |
| 152 | 10293 | INDUSTRI PEMBEKUAN BIOTA AIR LAINNYA |
| 153 | 10294 | INDUSTRI PEMINDANGAN BIOTA AIR LAINNYA |
| 154 | 10295 | INDUSTRI PERAGIAN/FERMENTASI BIOTA AIR LAINNYA |
| 155 | 10296 | INDUSTRI BERBASIS LUMATAN BIOTA AIR LAINNYA |
| 156 | 10297 | INDUSTRI PENDINGINAN/PENGESAN BIOTA AIR LAINNYA |
| 157 | 10299 | INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA UNTUK BIOTA AIR LAINNYA |
| 158 | 10311 | INDUSTRI PENGASINAN/PEMANISAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN |
| 159 | 10312 | INDUSTRI PELUMATAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN |
| 160 | 10313 | INDUSTRI PENGERINGAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN |
| 161 | 10314 | INDUSTRI PEMBEKUAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN |
| 162 | 10320 | INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN DALAM KALENG |
| 163 | 10330 | INDUSTRI PENGOLAHAN SARI BUAH DAN SAYURAN |
| 164 | 10391 | INDUSTRI TEMPE KEDELAI |
| 165 | 10392 | INDUSTRI TAHU KEDELAI |
| 166 | 10399 | INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN |
| 167 | 10411 | INDUSTRI MINYAK MAKAN DAN LEMAK NABATI |
| 168 | 10412 | INDUSTRI MARGARINE |
| 169 | 10413 | INDUSTRI MINYAK MAKAN DAN LEMAK HEWANI SELAIN IKAN |
| 170 | 10414 | INDUSTRI MINYAK IKAN |
| 171 | 10415 | INDUSTRI MINYAK GORENG BUKAN MINYAK KELAPA DAN MINYAK KELAPA SAWIT |
| 172 | 10421 | INDUSTRI KOPRA |
| 173 | 10422 | INDUSTRI MINYAK MAKAN KELAPA |
| 174 | 10423 | INDUSTRI MINYAK GORENG KELAPA |
| 175 | 10424 | INDUSTRI TEPUNG DAN PELET KELAPA |
| 176 | 10431 | INDUSTRI MINYAK MAKAN KELAPAN SAWIT (CRIUDE PALM OIL) |
| 177 | 10432 | INDUSTRI MINYAK GORENG KELAPA SAWIT |
| 178 | 10490 | INDUSTRI MINYAK MAKAN DAN LEMAK NABATI DAN HEWANI LAINNYA |
| 179 | 10510 | INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU SEGAR DAN KRIM |
| 180 | 10520 | INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU BUBUK DAN SUSU KENTAL |
| 181 | 10531 | INDUSTRI PENGOLAHAN ES KRIM |
| 182 | 10532 | INDUSTRI PENGOLAHAN ES SEJENISNYA YANG DAPAT DIMAKAN (BUKAN ES BATU DAN ES BALOK) |
| 183 | 10590 | INDUSTRI PENGOLAHAN PRODUK DARI SUSU LAINNYA |
| 184 | 10611 | INDUSTRI PENGGILINGAN DAN PEMBERSIHAN PADI-PADIAN DAN BIJI-BIJIAN |
| 185 | 10612 | INDUSTRI PENGUPASAN, PEMBERSIHAN DAN SORTASI KOPI |
| 186 | 10613 | INDUSTRI PENGUPASAN, PEMBERSIHAN DAN PENGERINGAN KAKAO |
| 187 | 10614 | INDUSTRI PENGUPASAN DAN PEMBERSIHAN BIJI-BIJIAN BUKAN KOPI DAN KAKAO |
| 188 | 10615 | INDUSTRI PENGUPASAN DAN PEMBERSIHAN KACANG-KACANGAN |
| 189 | 10616 | INDUSTRI PENGUPASAN DAN PEMBERSIHAN UMBI-UMBAN (TERMASUK RIZOMA) |
| 190 | 10617 | INDUSTRI TEPUNG TERIGU |
| 191 | 10618 | INDUSTRI BERBAGAI MACAM TEPUNG DARI PADI-PADIAN, BIJI-BIJIAN, KACANG-KACANGAN, |

| NO. | KODE | NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA |
|-----|-------|--|
| 192 | 10621 | INDUSTRI PATI UBI KAYU |
| 193 | 10622 | INDUSTRI BERBAGAI MACAM PATI PALMA |
| 194 | 10623 | INDUSTRI GLUKOSA DAN SEJENISNYA |
| 195 | 10629 | INDUSTRI PATI LAINNYA |
| 196 | 10631 | INDUSTRI PENGGILINGAN PADI DAN PENYOSOHAN BERAS |
| 197 | 10632 | INDUSTRI PENGGILINGAN DAN PEMBERSIHAN JAGUNG |
| 198 | 10633 | INDUSTRI TEPUNG BERAS DAN TEPUNG JAGUNG |
| 199 | 10634 | INDUSTRI PATI BERAS DAN JAGUNG |
| 200 | 10710 | INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE |
| 201 | 10721 | INDUSTRI GULA PASIR |
| 202 | 10722 | INDUSTRI GULA MERAH |
| 203 | 10723 | INDUSTRI SIROP |
| 204 | 10729 | INDUSTRI PENGOLAHAN GULA LAINNYA BUKAN SIROP |
| 205 | 10731 | INDUSTRI KAKAO |
| 206 | 10732 | INDUSTRI MAKANAN DARI COKELAT DAN KEMBANG GULA |
| 207 | 10733 | INDUSTRI MANISAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN KERING |
| 208 | 10739 | INDUSTRI KEMBANG GULA LAINNYA |
| 209 | 10740 | INDUSTRI MAKARONI, MIE DAN PRODUK SEJENISNYA |
| 210 | 10750 | INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN |
| 211 | 10761 | INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI DAN TEH |
| 212 | 10762 | INDUSTRI PENGOLAHAN HERBAL (HERB INFUSION) |
| 213 | 10771 | INDUSTRI KECAP |
| 214 | 10772 | INDUSTRI BUMBU MASAK DAN PENYEDAP MASAKAN |
| 215 | 10773 | INDUSTRI PRODUK MASAK DARI KELAPA |
| 216 | 10774 | INDUSTRI PENGOLAHAN GARAM |
| 217 | 10779 | INDUSTRI PRODUK MASAK LAINNYA |
| 218 | 10791 | INDUSTRI MAKANAN BAYI |
| 219 | 10792 | INDUSTRI KUE BASAH |
| 220 | 10793 | INDUSTRI MAKANAN DARI KEDELE DAN KACANG-KACANGAN LAINNYA BUKAN KECAP, TEMPE DAN TAHU |
| 221 | 10794 | INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA |
| 222 | 10799 | INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA |
| 223 | 10801 | INDUSTRI RANSUM MAKANAN HEWAN |
| 224 | 10802 | INDUSTRI KONSENTRAT MAKANAN HEWAN |
| 225 | 11010 | INDUSTRI MINUMAN KERAS |
| 226 | 11020 | INDUSTRI MINUMAN ANGGUR (WINE) |
| 227 | 11030 | INDUSTRI MINUMAN KERAS DARI MALT DAN MALT |
| 228 | 11040 | INDUSTRI MINUMAN RINGAN |
| 229 | 11050 | INDUSTRI AIR MINUM DAN AIR MINERAL |
| 230 | 11090 | INDUSTRI MINUMAN LAINNYA |
| 231 | 12011 | INDUSTRI ROKOK KRETEK |
| 232 | 12012 | INDUSTRI ROKOK PUTIH |
| 233 | 12019 | INDUSTRI ROKOK DAN CERUTU LAINNYA |
| 234 | 12091 | INDUSTRI PENGERINGAN DAN PENGOLAHAN TEMBAKAU |
| 235 | 12099 | INDUSTRI BUMBU ROKOK SERTA KELENGKAPAN ROKOK LAINNYA |
| 236 | 13111 | INDUSTRI PERSIAPAN SERAT TEKSTIL |
| 237 | 13112 | INDUSTRI PEMINTALAN BENANG |
| 238 | 13113 | INDUSTRI PEMINTALAN BENANG JAHIT |
| 239 | 13121 | INDUSTRI PERTENUNAN (BUKAN PERTENUNAN KARUNG GONI DAN KARUNG LAINNYA) |
| 240 | 13122 | INDUSTRI KAIN TENUN IKAT |
| 241 | 13123 | INDUSTRI BULU TIRUAN TENUNAN |
| 242 | 13131 | INDUSTRI PENYEMPURNAAN BENANG |
| 243 | 13132 | INDUSTRI PENYEMPURNAAN KAIN |
| 244 | 13133 | INDUSTRI PENCETAKAN KAIN |
| 245 | 13134 | INDUSTRI BATIK |
| 246 | 13911 | INDUSTRI KAIN RAJUTAN |

| NO. | KODE | NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA |
|-----|-------|---|
| 247 | 13912 | INDUSTRI KAIN SULAMAN/BORDIR |
| 248 | 13913 | INDUSTRI BULU TIRUAN RAJUTAN |
| 249 | 13921 | INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA |
| 250 | 13922 | INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL SULAMAN |
| 251 | 13923 | INDUSTRI BANTAL DAN SEJENISNYA |
| 252 | 13924 | INDUSTRI BARANG JADI RAJUTAN DAN SULAMAN |
| 253 | 13929 | INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL LAINNYA |
| 254 | 13930 | INDUSTRI KARPET DAN PERMADANI |
| 255 | 13941 | INDUSTRI TALI |
| 256 | 13942 | INDUSTRI BARANG DARI TALI |
| 257 | 13991 | INDUSTRI KAIN PITA (NARROW FABRIC) |
| 258 | 13992 | INDUSTRI YANG MENGHASILKAN KAIN KEPERLUAN INDUSTRI |
| 259 | 13993 | INDUSTRI NON WOVEN (BUKAN TENUNAN) |
| 260 | 13994 | INDUSTRI KAIN BAN |
| 261 | 13995 | INDUSTRI KARUNG GONI |
| 262 | 13996 | INDUSTRI KARUNG BUKAN GONI |
| 263 | 13997 | INDUSTRI KAPUK |
| 264 | 13999 | INDUSTRI TEKSTIL LAINNYA YTDL |
| 265 | 14111 | INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI TEKSTIL |
| 266 | 14112 | INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI KULIT |
| 267 | 14120 | PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN |
| 268 | 14131 | INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI TEKSTIL |
| 269 | 14132 | INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI KULIT |
| 270 | 14200 | INDUSTRI PAKAIAN JADI DAN BARANG DARI KULIT BERBULU |
| 271 | 14301 | INDUSTRI PAKAIAN JADI RAJUTAN |
| 272 | 14302 | INDUSTRI PAKAIAN JADI SULAMAN/BORDIR |
| 273 | 14303 | INDUSTRI RAJUTAN KAOS KAKI DAN SEJENISNYA |
| 274 | 15111 | INDUSTRI PENGAWETAN KULIT |
| 275 | 15112 | INDUSTRI PENYAMAKAN KULIT |
| 276 | 15113 | INDUSTRI PENCELUPAN KULIT BULU |
| 277 | 15114 | INDUSTRI KULIT BUATAN/IMITASI |
| 278 | 15121 | INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT BUATAN UNTUK KEPERLUAN PRIBADI |
| 279 | 15122 | INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT BUATAN UNTUK KEPERLUAN TEKNIK/INDUSTRI |
| 280 | 15123 | INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT BUATAN UNTUK KEPERLUAN HEWAN |
| 281 | 15129 | INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT BUATAN UNTUK KEPERLUAN LAINNYA |
| 282 | 15201 | INDUSTRI ALAS KAKI UNTUK KEPERLUAN SEHARI-HARI |
| 283 | 15202 | INDUSTRI SEPATU OLAHRAGA |
| 284 | 15203 | INDUSTRI SEPATU TEKNIK LAPANGAN/KEPERLUAN INDUSTRI |
| 285 | 15209 | INDUSTRI ALAS KAKI LAINNYA |
| 286 | 16101 | INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU |
| 287 | 16102 | INDUSTRI PENGAWETAN KAYU |
| 288 | 16103 | INDUSTRI PENGAWETAN ROTAN, BAMBU DAN SEJENISNYA |
| 289 | 16104 | INDUSTRI PENGOLAHAN ROTAN |
| 290 | 16211 | INDUSTRI KAYU LAPIS |
| 291 | 16212 | INDUSTRI KAYU LAPIS LAMINASI, TERMASUK DECORATIVE PLYWOOD |
| 292 | 16213 | INDUSTRI PANEL KAYU LAINNYA |
| 293 | 16214 | INDUSTRI VENEER |
| 294 | 16221 | INDUSTRI BARANG BANGUNAN DARI KAYU |
| 295 | 16222 | INDUSTRI BANGUNAN PRAFABRIKASI DARI KAYU |
| 296 | 16230 | INDUSTRI WADAH DARI KAYU |
| 297 | 16291 | INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI ROTAN DAN BAMBU |
| 298 | 16292 | INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI TANAMAN BUKAN ROTAN DAN BAMBU |
| 299 | 16293 | INDUSTRI KERAJINAN UKIRAN DARI KAYU BUKAN MEBELLER |
| 300 | 16294 | INDUSTRI ALAT DAPUR DARI KAYU, ROTAN DAN BAMBU |

| NO. | KODE | NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA |
|-----|-------|--|
| 301 | 16295 | INDUSTRI KAYU BAKAR DAN PELET KAYU |
| 302 | 16299 | INDUSTRI BARANG DARI KAYU, ROTAN, GABUS LAINNYA YTDL |
| 303 | 17011 | INDUSTRI BUBUR KERTAS (PULP) |
| 304 | 17012 | INDUSTRI KERTAS BUDAYA |
| 305 | 17013 | INDUSTRI KERTAS BERHARGA |
| 306 | 17014 | INDUSTRI KERTAS KHUSUS |
| 307 | 17019 | INDUSTRI KERTAS LAINNYA |
| 308 | 17021 | INDUSTRI KERTAS DAN PAPAN KERTAS BERGELOMBANG |
| 309 | 17022 | INDUSTRI KEMASAN DAN KOTAK DARI KERTAS DAN KARTON |
| 310 | 17091 | INDUSTRI KERTAS TISSUE |
| 311 | 17099 | INDUSTRI BARANG DARI KERTAS DAN PAPAN KERTAS LAINNYA YTDL |
| 312 | 18111 | INDUSTRI PENCETAKAN UMUM |
| 313 | 18112 | INDUSTRI PENCETAKAN KHUSUS |
| 314 | 18120 | JASA PENUNJANG PENCETAKAN |
| 315 | 18201 | REPRODUKSI MEDIA REKAMAN SUARA DAN PIRANTI LUNAK |
| 316 | 18202 | REPRODUKSI MEDIA REKAMAN FILM DAN VIDEO |
| 317 | 19100 | INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA |
| 318 | 19211 | INDUSTRI PEMURNIAN DAN PENGILANGAN MINYAK BUMI |
| 319 | 19212 | INDUSTRI PEMURNIAN DAN PENGOLAHAN GAS ALAM |
| 320 | 19213 | INDUSTRI PEMBUATAN MINYAK PELUMAS |
| 321 | 19214 | INDUSTRI PENGOLAHAN KEMBALI MINYAK PELUMAS BEKAS |
| 322 | 19291 | INDUSTRI PRODUK DARI HASIL KILANG MINYAK BUMI |
| 323 | 19292 | INDUSTRI BRIKET BATU BARA |
| 324 | 20111 | INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK KHLOR DAN ALKALI |
| 325 | 20112 | INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK GAS INDUSTRI |
| 326 | 20113 | INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK PIGMEN |
| 327 | 20114 | INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK LAINNYA |
| 328 | 20115 | INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG BERSUMBER DARI HASIL PERTANIAN |
| 329 | 20116 | INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK UNTUK BAHAN BAKU ZAT WARNA DAN PIGMEN, ZAT WARNA DAN PIGMEN |
| 330 | 20117 | INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG BERSUMBER DARI MINYAK BUMI, GAS ALAM DAN BATU BARA |
| 331 | 20118 | INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG MENGHASILKAN BAHAN KIMIA KHUSUS |
| 332 | 20119 | INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK LAINNYA |
| 333 | 20121 | INDUSTRI PUPUK ALAM/NON SINTETIS HARA MAKRO PRIMER |
| 334 | 20122 | INDUSTRI PUPUK BUATAN TUNGGAL HARA MAKRO PRIMER |
| 335 | 20123 | INDUSTRI PUPUK BUATAN MAJEMUK HARA MAKRO PRIMER |
| 336 | 20124 | INDUSTRI PUPUK BUATAN CAMPURAN HARA MAKRO PRIMER |
| 337 | 20125 | INDUSTRI PUPUK HARA MAKRO SEKUNDER |
| 338 | 20126 | INDUSTRI PUPUK HARA MIKRO |
| 339 | 20127 | INDUSTRI PUPUK PELENGKAP |
| 340 | 20129 | INDUSTRI PUPUK LAINNYA |
| 341 | 20131 | INDUSTRI DAMAR BUATAN (RESIN SINTETIS) DAN BAHAN BAKU PLASTIK |
| 342 | 20132 | INDUSTRI KARET BUATAN |
| 343 | 20211 | INDUSTRI BAHAN BAKU PEMBERANTAS HAMA (BAHAN AKTIF) |
| 344 | 20212 | INDUSTRI PEMBERANTAS HAMA (FORMULASI) |
| 345 | 20213 | INDUSTRI ZAT PENGATUR TUMBUH |
| 346 | 20214 | INDUSTRI BAHAN AMELIORAN (PEMBENAH TANAH) |
| 347 | 20221 | INDUSTRI CAT DAN TINTA CETAK |
| 348 | 20222 | INDUSTRI PERNIS (TERMASUK MASTIK) |
| 349 | 20223 | INDUSTRI LAK |
| 350 | 20231 | INDUSTRI SABUN DAN BAHAN PEMBERSIH KEPERLUAN RUMAH TANGGA |
| 351 | 20232 | INDUSTRI BAHAN KOSMETIK DAN KOSMETIK, TERMASUK PASTA GIGI |
| 352 | 20291 | INDUSTRI PEREKAT/LEM |
| 353 | 20292 | INDUSTRI BAHAN PELEDAK |
| 354 | 20293 | INDUSTRI TINTA |

| NO. | KODE | NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA |
|-----|-------|--|
| 355 | 20294 | INDUSTRI MINYAK ATSIRI |
| 356 | 20295 | INDUSTRI KOREK API |
| 357 | 20299 | INDUSTRI BARANG KIMIA LAINNYA YTDL |
| 358 | 20301 | INDUSTRI SERAT/BENANG/STRIP FILAMEN BUATAN |
| 359 | 20302 | INDUSTRI SERAT STAPEL BUATAN |
| 360 | 21011 | INDUSTRI BAHAN FARMASI |
| 361 | 21012 | INDUSTRI PRODUK FARMASI |
| 362 | 21021 | INDUSTRI SIMPLISIA (BAHAN OBAT TRADISIONAL) |
| 363 | 21022 | INDUSTRI PRODUK OBAT TRADISIONAL |
| 364 | 22111 | INDUSTRI BAN LUAR DAN BAN DALAM |
| 365 | 22112 | INDUSTRI VULKANISIR BAN |
| 366 | 22121 | INDUSTRI PENGASAPAN KARET |
| 367 | 22122 | INDUSTRI REMILING KARET |
| 368 | 22123 | INDUSTRI KARET REMAH (CRUMB RUBBER) |
| 369 | 22191 | INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA |
| 370 | 22192 | INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI |
| 371 | 22199 | INDUSTRI BARANG DARI KARET LAINNYA YTDL |
| 372 | 22210 | INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK BANGUNAN |
| 373 | 22220 | INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK PENGEMASAN |
| 374 | 22230 | INDUSTRI PIPA PLASTIK DAN PERLENGKAPANNYA |
| 375 | 22291 | INDUSTRI BARANG PLASTIK LEMBARAN |
| 376 | 22292 | INDUSTRI PERLENGKAPAN DAN PERALATAN RUMAH TANGGA (TIDAK TERMASUK FURNITUR) |
| 377 | 22293 | INDUSTRI BARANG DAN PERALATAN TEKNIK/INDUSTRI DARI PLASTIK |
| 378 | 22299 | INDUSTRI BARANG PLASTIK LAINNYA YTDL |
| 379 | 23111 | INDUSTRI KACA LEMBARAN |
| 380 | 23112 | INDUSTRI KACA PENGAMAN |
| 381 | 23119 | INDUSTRI KACA LAINNYA |
| 382 | 23121 | INDUSTRI PERLENGKAPAN DAN PERALATAN RUMAH TANGGA DARI KACA |
| 383 | 23122 | INDUSTRI ALAT-ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KESEHATAN DARI KACA |
| 384 | 23123 | INDUSTRI KEMASAN DARI KACA |
| 385 | 23129 | INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI KACA |
| 386 | 23911 | INDUSTRI BATA, MORTAR DAN SEMEN TAHAN API |
| 387 | 23919 | INDUSTRI BARANG TAHAN API DARI TANAH LIAT/KERAMIK LAINNYA |
| 388 | 23921 | INDUSTRI BATU BATA DARI TANAH LIAT/KERAMIK |
| 389 | 23922 | INDUSTRI GENTENG DARI TANAH LIAT/KERAMIK |
| 390 | 23923 | INDUSTRI PERALATAN SANITER DARI PORSELEN |
| 391 | 23929 | INDUSTRI BAHAN BANGUNAN DARI TANAH LIAT/KERAMIK BUKAN BATU BATA DAN GENTENG |
| 392 | 23931 | INDUSTRI PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI PORSELEN |
| 393 | 23932 | INDUSTRI PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI TANAH LIAT/KERAMIK |
| 394 | 23933 | INDUSTRI ALAT LABORATORIUM DAN ALAT LISTRIK/TEKNIK DARI PORSELEN |
| 395 | 23939 | INDUSTRI BARANG TANAH LIAT/KERAMIK DAN PORSELEN LAINNYA BUKAN BAHAN BANGUNAN |
| 396 | 23941 | INDUSTRI SEMEN |
| 397 | 23942 | INDUSTRI KAPUR |
| 398 | 23943 | INDUSTRI GIPS |
| 399 | 23951 | INDUSTRI BARANG DARI SEMEN |
| 400 | 23952 | INDUSTRI BARANG DARI KAPUR |
| 401 | 23953 | INDUSTRI BARANG DARI SEMEN DAN KAPUR UNTUK KONSTRUKSI |
| 402 | 23954 | INDUSTRI BARANG DARI GIPS UNTUK KONSTRUKSI |
| 403 | 23955 | INDUSTRI BARANG DARI ASBES UNTUK KEPERLUAN BAHAN BANGUNAN |
| 404 | 23956 | INDUSTRI BARANG DARI ASBES UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI |
| 405 | 23957 | INDUSTRI MORTAR ATAU BETON SIAP PAKAI |
| 406 | 23959 | INDUSTRI BARANG DARI SEMEN, KAPUR, GIPS DAN ASBES LAINNYA |
| 407 | 23961 | INDUSTRI BARANG DARI MARMER DAN GRANIT UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PAJANGAN |

| NO. | KODE | NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA |
|-----|-------|---|
| 408 | 23962 | INDUSTRI BARANG DARI MARMER DAN GRANIT UNTUK KEPERLUAN BAHAN BANGUNAN |
| 409 | 23963 | INDUSTRI BARANG DARI BATU UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PAJANGAN |
| 410 | 23969 | INDUSTRI BARANG DARI MARMER, GRANIT DAN BATU LAINNYA |
| 411 | 23990 | INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM LAINNYA YTDL |
| 412 | 24101 | INDUSTRI BESI DAN BAJA DASAR (IRON AND STEEL MAKING) |
| 413 | 24102 | INDUSTRI PENGGILINGAN BAJA (STEEL ROLLING) |
| 414 | 24103 | INDUSTRI PIPA DAN SAMBUNGAN PIPA DARI BAJA DAN BESI |
| 415 | 24201 | INDUSTRI PEMBUATAN LOGAM DASAR MULIA |
| 416 | 24202 | INDUSTRI PEMBUATAN LOGAM DASAR BUKAN BESI |
| 417 | 24203 | INDUSTRI PENGGILINGAN LOGAM BUKAN BESI |
| 418 | 24204 | INDUSTRI EKSTRUSI LOGAM BUKAN BESI |
| 419 | 24205 | INDUSTRI PIPA DAN SAMBUNGAN PIPA DARI LOGAM BUKAN BESI DAN BAJA |
| 420 | 24206 | INDUSTRI PENGOLAHAN URANIUM DAN BIJIH URANIUM |
| 421 | 24310 | INDUSTRI PENGEORAN BESI DAN BAJA |
| 422 | 24320 | INDUSTRI PENGEORAN LOGAM BUKAN BESI DAN BAJA |
| 423 | 25111 | INDUSTRI BARANG DARI LOGAM BUKAN ALUMINIUM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN |
| 424 | 25112 | INDUSTRI BARANG DARI LOGAM ALUMINIUM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN |
| 425 | 25113 | INDUSTRI KONSTRUKSI BERAT SIAP PASANG DARI BAJA UNTUK BANGUNAN |
| 426 | 25119 | INDUSTRI BARANG DARI LOGAM SIAP PASANG UNTUK KONSTRUKSI LAINNYA |
| 427 | 25120 | INDUSTRI TANGKI, TANDON AIR DAN WADAH DARI LOGAM |
| 428 | 25130 | INDUSTRI GENERATOR UAP, BUKAN KETEL PEMANAS |
| 429 | 25200 | INDUSTRI SENJATA DAN AMUNISI |
| 430 | 25910 | INDUSTRI PENEMPAAN, PENGEPRESAN, PENCETAKAN DAN PEMBENTUKAN LOGAM; METALURGI BUBUK |
| 431 | 25920 | JASA INDUSTRI UNTUK BERBAGAI Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam |
| 432 | 25931 | INDUSTRI ALAT POTONG DAN PERKAKAS TANGAN UNTUK PERTANIAN |
| 433 | 25932 | INDUSTRI ALAT POTONG DAN PERKAKAS TANGAN PERTUKANGAN |
| 434 | 25933 | INDUSTRI ALAT POTONG DAN PERKAKAS TANGAN YANG DIGUNAKAN DALAM RUMAH TANGGA |
| 435 | 25934 | INDUSTRI PERALATAN UMUM |
| 436 | 25940 | INDUSTRI EMBER, KALENG, DRUM DAN WADAH SEJENIS DARI LOGAM |
| 437 | 25951 | INDUSTRI BARANG DARI KAWAT |
| 438 | 25952 | INDUSTRI PAKU, MUR DAN BAUT |
| 439 | 25991 | INDUSTRI BRANKAS, FILLING KANTOR DAN SEJENISNYA |
| 440 | 25992 | INDUSTRI PERALATAN DAPUR DAN PERALATAN MEJA DARI LOGAM |
| 441 | 25993 | INDUSTRI KEPERLUAN RUMAH TANGGA DARI LOGAM BUKAN PERALATAN DAPUR DAN PERALATAN MEJA |
| 442 | 25994 | INDUSTRI PEMBUATAN PROFIL |
| 443 | 25995 | INDUSTRI LAMPU DARI LOGAM |
| 444 | 25999 | INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA YTDL |
| 445 | 26110 | INDUSTRI TABUNG ELEKTRON DAN KONEKTOR ELEKTRONIK |
| 446 | 26120 | INDUSTRI SEMI KONDUKTOR DAN KOMPONEN ELEKTRONIK LAINNYA |
| 447 | 26210 | INDUSTRI KOMPUTER DAN/ATAU PERAKITAN KOMPUTER |
| 448 | 26220 | INDUSTRI PERLENGKAPAN KOMPUTER |
| 449 | 26310 | INDUSTRI PERALATAN TELEPON DAN FAKSIMILI |
| 450 | 26320 | INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI TANPA KABEL (WIRELESS) |
| 451 | 26390 | INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI LAINNYA |
| 452 | 26410 | INDUSTRI TELEVISI DAN/ATAU PERAKITAN TELEVISI |
| 453 | 26420 | INDUSTRI PERALATAN PEREKAM, PENERIMA DAN PENGGANDA AUDIO DAN VIDEO, BUKAN INDUSTRI TELEVISI |
| 454 | 26490 | INDUSTRI PERALATAN AUDIO DAN VIDEO ELEKTRONIK LAINNYA |
| 455 | 26511 | INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI MANUAL |
| 456 | 26512 | INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI ELEKTRIK |

| NO. | KODE | NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA |
|-----|-------|---|
| 457 | 26513 | INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI ELEKTRONIK |
| 458 | 26514 | INDUSTRI ALAT UJI DALAM PROSES INDUSTRI |
| 459 | 26520 | INDUSTRI ALAT UKUR WAKTU |
| 460 | 26601 | INDUSTRI PERALATAN IRADIASI/SINAR X, PERLENGKAPAN DAN SEJENISNYA |
| 461 | 26602 | INDUSTRI PERALATAN ELEKTROMEDIKAL DAN ELEKTROTHERAPI |
| 462 | 26710 | INDUSTRI PERALATAN FOTOGRAFI |
| 463 | 26791 | INDUSTRI KAMERA CINEMATOGRAFI PROYEKTOR DAN PERLENGKAPANNYA |
| 464 | 26792 | INDUSTRI TEROPONG DAN INSTRUMEN OPTIK BUKAN KACA MATA |
| 465 | 26800 | INDUSTRI MEDIA MAGNETIK DAN MEDIA OPTIK |
| 466 | 27111 | INDUSTRI MOTOR LISTRIK |
| 467 | 27112 | INDUSTRI MESIN PEMBANGKIT LISTRIK |
| 468 | 27113 | INDUSTRI PENGUBAH TEGANGAN (TRANSFORMATOR), PENGUBAH ARUS (RECTIFIER) DAN |
| 469 | 27120 | INDUSTRI PERALATAN PENGONTROL DAN PENDISTRIBUSIAN LISTRIK |
| 470 | 27201 | INDUSTRI BATU BATERAI KERING (BATU BATERAI PRIMER) |
| 471 | 27202 | INDUSTRI AKUMULATOR LISTRIK (BATU BATERAI SEKUNDER) |
| 472 | 27310 | INDUSTRI KABEL SERAT OPTIK |
| 473 | 27320 | INDUSTRI KABEL LISTRIK DAN ELEKTRONIK LAINNYA |
| 474 | 27330 | INDUSTRI PERLENGKAPAN KABEL |
| 475 | 27401 | INDUSTRI BOLA LAMPU PIJAR, LAMPU PENERANGAN TERPUSAT DAN LAMPU ULTRA VIOLET |
| 476 | 27402 | INDUSTRI LAMPU TABUNG GAS (LAMPU PEMBUANG LISTRIK) |
| 477 | 27403 | INDUSTRI PERALATAN PENERANGAN UNTUK ALAT TRANSPORTASI |
| 478 | 27409 | INDUSTRI PERALATAN PENERANGAN LAINNYA |
| 479 | 27510 | INDUSTRI PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA |
| 480 | 27520 | INDUSTRI PERALATAN ELEKTROTHERMAL RUMAH TANGGA |
| 481 | 27530 | INDUSTRI PERALATAN PEMANAS DAN MASAK BUKAN LISTRIK RUMAH TANGGA |
| 482 | 27900 | INDUSTRI PERALATAN LISTRIK LAINNYA |
| 483 | 28111 | INDUSTRI MESIN UAP, TURBIN DAN KINCIR |
| 484 | 28112 | INDUSTRI MOTOR PEMBAKARAN DALAM |
| 485 | 28113 | INDUSTRI KOMPONEN DAN SUKU CADANG MESIN DAN TURBIN |
| 486 | 28120 | INDUSTRI PERALATAN TENAGA ZAT CAIR DAN GAS |
| 487 | 28130 | INDUSTRI POMPA LAINNYA, KOMPRESOR, KRAN DAN KLEP/KATUP |
| 488 | 28140 | INDUSTRI BEARING, RODA GIGI DAN ELEMEN PENGGERAK MESIN |
| 489 | 28151 | INDUSTRI OVEN, PERAPIAN DAN TUNGKU PEMBAKAR SEJENIS YANG TIDAK MENGGUNAKAN ARUS LISTRIK |
| 490 | 28152 | INDUSTRI OVEN, PERAPIAN DAN TUNGKU PEMBAKAR SEJENIS YANG MENGGUNAKAN ARUS LISTRIK |
| 491 | 28160 | INDUSTRI ALAT PENGANGKAT DAN PEMINDAH |
| 492 | 28171 | INDUSTRI MESIN KANTOR DAN AKUNTANSI MANUAL |
| 493 | 28172 | INDUSTRI MESIN KANTOR DAN AKUNTANSI ELEKTRIK |
| 494 | 28173 | INDUSTRI MESIN KANTOR DAN AKUNTANSI ELEKTRONIK |
| 495 | 28174 | INDUSTRI MESIN FOTOCOPI |
| 496 | 28179 | INDUSTRI MESIN DAN PERALATAN KANTOR LAINNYA |
| 497 | 28180 | INDUSTRI PERKAKAS TANGAN YANG DIGERAKKAN TENAGA |
| 498 | 28191 | INDUSTRI MESIN UNTUK PEMBUNGKUS, PEMBOTOLAN DAN PENGALENGAN |
| 499 | 28192 | INDUSTRI MESIN TIMBANGAN |
| 500 | 28193 | INDUSTRI MESIN PENDINGIN |
| 501 | 28199 | INDUSTRI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM LAINNYA YTDL |
| 502 | 28210 | INDUSTRI MESIN PERTANIAN DAN KEHUTANAN |
| 503 | 28221 | INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK Pengerjaan LOGAM |
| 504 | 28222 | INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK Pengerjaan KAYU |
| 505 | 28223 | INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK Pengerjaan BAHAN BUKAN LOGAM DAN KAYU |
| 506 | 28224 | INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK PENGELASAN YANG MENGGUNAKAN ARUS LISTRIK |

| NO. | KODE | NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA |
|-----|-------|--|
| 507 | 28230 | INDUSTRI MESIN METALURGI |
| 508 | 28240 | INDUSTRI MESIN PENAMBANGAN, PENGGALIAN DAN KONSTRUKSI |
| 509 | 28250 | INDUSTRI MESIN PENGOLAHAN MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU |
| 510 | 28261 | INDUSTRI KABINET MESIN JAHIT |
| 511 | 28262 | INDUSTRI MESIN JAHIT SERTA MESIN CUCI DAN MESIN PENGERING UNTUK KEPERLUAN NIAGA |
| 512 | 28263 | INDUSTRI MESIN TEKSTIL |
| 513 | 28264 | INDUSTRI JARUM MESIN JAHIT, RAJUT, BORDIR DAN SEJENISNYA |
| 514 | 28265 | INDUSTRI MESIN PENYIAPAN DAN PEMBUATAN PRODUK KULIT |
| 515 | 28291 | INDUSTRI MESIN PERCETAKAN |
| 516 | 28292 | INDUSTRI MESIN PABRIK KERTAS |
| 517 | 28299 | INDUSTRI MESIN KEPERLUAN KHUSUS LAINNYA YTDL |
| 518 | 29100 | INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH |
| 519 | 29200 | INDUSTRI KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH DAN INDUSTRI TRAILER DAN SEMI TRAILER |
| 520 | 29300 | INDUSTRI SUKU CADANG DAN AKSESORI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH |
| 521 | 30111 | INDUSTRI KAPAL DAN PERAHU |
| 522 | 30112 | INDUSTRI BANGUNAN LEPAS PANTAI DAN BANGUNAN TERAPUNG |
| 523 | 30113 | INDUSTRI PERALATAN, PERLENGKAPAN DAN BAGIAN KAPAL |
| 524 | 30120 | INDUSTRI PEMBUATAN KAPAL PESIAR DAN PERAHU UNTUK OLAHRAGA |
| 525 | 30200 | INDUSTRI LOKOMOTIF DAN GERBONG KERETA |
| 526 | 30300 | INDUSTRI PESAWAT TERBANG DAN PERLENGKAPANNYA |
| 527 | 30400 | INDUSTRI KENDARAAN PERANG |
| 528 | 30911 | INDUSTRI SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA |
| 529 | 30912 | INDUSTRI KOMPONEN DAN PERLENGKAPAN SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA |
| 530 | 30921 | INDUSTRI SEPEDA DAN KURSI RODA TERMASUK BECAK |
| 531 | 30922 | INDUSTRI PERLENGKAPAN SEPEDA DAN KURSI RODA TERMASUK BECAK |
| 532 | 30990 | INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA YTDL |
| 533 | 31001 | INDUSTRI FURNITUR DARI KAYU |
| 534 | 31002 | INDUSTRI FURNITUR DARI ROTAN DAN ATAU BAMBU |
| 535 | 31003 | INDUSTRI FURNITUR DARI PLASTIK |
| 536 | 31004 | INDUSTRI FURNITUR DARI LOGAM |
| 537 | 31009 | INDUSTRI FURNITUR LAINNYA |
| 538 | 32111 | INDUSTRI PERMATA |
| 539 | 32112 | INDUSTRI BARANG PERHIASAN DARI LOGAM MULIA UNTUK KEPERLUAN PRIBADI |
| 540 | 32113 | INDUSTRI BARANG PERHIASAN DARI LOGAM MULIA BUKAN UNTUK KEPERLUAN PRIBADI |
| 541 | 32114 | INDUSTRI BARANG DARI LOGAM MULIA UNTUK KEPERLUAN TEKNIK DAN ATAU LABORATORIUM |
| 542 | 32115 | INDUSTRI PERHIASAN MUTIARA |
| 543 | 32119 | INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI LOGAM MULIA |
| 544 | 32120 | INDUSTRI PERHIASAN IMITASI DAN BARANG SEJENIS |
| 545 | 32201 | INDUSTRI ALAT MUSIK TRADISIONAL |
| 546 | 32202 | INDUSTRI ALAT MUSIK BUKAN TRADISIONAL |
| 547 | 32300 | INDUSTRI ALAT OLAHRAGA |
| 548 | 32401 | INDUSTRI ALAT PERMAINAN |
| 549 | 32402 | INDUSTRI MAINAN ANAK-ANAK |
| 550 | 32501 | INDUSTRI FURNITUR UNTUK OPERASI, PERAWATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI |
| 551 | 32502 | INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI, PERLENGKAPAN ORTHOPAEDIC DAN PROSTHETIC |
| 552 | 32503 | INDUSTRI KACA MATA |
| 553 | 32509 | INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI SERTA PERLENGKAPAN LAINNYA |
| 554 | 32901 | INDUSTRI ALAT TULIS DAN GAMBAR TERMASUK PERLENGKAPANNYA |
| 555 | 32902 | INDUSTRI PITA MESIN TULIS/GAMBAR |

| NO. | KODE | NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA |
|-----|-------|---|
| 556 | 32903 | INDUSTRI KERAJINAN YTDL |
| 557 | 32904 | INDUSTRI PERALATAN UNTUK PELINDUNG KESELAMATAN |
| 558 | 32905 | INDUSTRI DARI SABUT KELAPA |
| 559 | 32909 | INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA YTDL |
| 560 | 33111 | JASA REPARASI PRODUK LOGAM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN, TANGKI, TANDON AIR DAN GENERATOR UAP |
| 561 | 33112 | JASA REPARASI PRODUK SENJATA DAN AMUNISI |
| 562 | 33119 | JASA REPARASI PRODUK LOGAM PABRIKASI LAINNYA |
| 563 | 33121 | JASA REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM |
| 564 | 33122 | JASA REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS |
| 565 | 33131 | JASA REPARASI ALAT UKUR, ALAT UJI DAN PERALATAN NAVIGASI DAN PENGONTROL |
| 566 | 33132 | JASA REPARASI PERALATAN IRRADIASI, ELEKTROMEDIS DAN ELEKTROTHERAPI |
| 567 | 33133 | JASA REPARASI PERALATAN FOTOGRAFI DAN OPTIK |
| 568 | 33141 | JASA REPARASI MOTOR LISTRIK, GENERATOR DAN TRANSFORMATOR |
| 569 | 33142 | JASA REPARASI BATERAI DAN AKUMULATOR LISTRIK |
| 570 | 33149 | JASA REPARASI PERALATAN LISTRIK LAINNYA |
| 571 | 33151 | JASA REPARASI KAPAL, PERAHU DAN BANGUNAN TERAPUNG |
| 572 | 33152 | JASA REPARASI LOKOMOTIF DAN GERBONG KERETA |
| 573 | 33153 | JASA REPARASI PESAWAT TERBANG |
| 574 | 33159 | JASA REPARASI ALAT ANGKUTAN LAINNYA, BUKAN KENDARAAN BERMOTOR |
| 575 | 33190 | JASA REPARASI PERALATAN LAINNYA |
| 576 | 33200 | JASA PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI |
| 577 | 35101 | PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK |
| 578 | 35201 | PENGADAAN GAS ALAM DAN BUATAN |
| 579 | 35202 | DISTRIBUSI GAS ALAM DAN BUATAN |
| 580 | 36001 | PENAMPUNGAN, PENJERNIHAN DAN PENYALURAN AIR MINUM |
| 581 | 36002 | PENAMPUNGAN DAN PENYALURAN AIR BAKU |
| 582 | 36003 | JASA PENUNJANG PENGADAAN AIR |
| 583 | 38302 | DAUR ULANG BARANG BUKAN LOGAM |
| 584 | 41011 | KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL |
| 585 | 41012 | KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN |
| 586 | 41013 | KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI |
| 587 | 41014 | KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN |
| 588 | 41015 | KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN |
| 589 | 41016 | KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN |
| 590 | 41017 | KONSTRUKSI GEDUNG PENGINAPAN |
| 591 | 41018 | KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN |
| 592 | 41019 | KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA |
| 593 | 41020 | PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI GEDUNG |
| 594 | 42111 | KONSTRUKSI JALAN RAYA |
| 595 | 42112 | KONSTRUKSI JEMBATAN DAN JALAN LAYANG |
| 596 | 42113 | KONSTRUKSI LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG |
| 597 | 42114 | KONSTRUKSI JALAN KERETA API DAN JEMBATAN KERETA API |
| 598 | 42115 | KONSTRUKSI TEROWONGAN |
| 599 | 42120 | PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI JALAN DAN REL KERETA API |
| 600 | 42211 | KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN IRIGASI |
| 601 | 42212 | KONSTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN, PENYALURAN DAN PENAMPUNGAN AIR MINUM, AIR LIMBAH DAN DRAINASE |
| 602 | 42213 | KONSTRUKSI BANGUNAN ELEKTRIKAL |
| 603 | 42214 | KONSTRUKSI TELEKOMUNIKASI SARANA BANTU NAVIGASI LAUT DAN RAMBU SUNGAI |
| 604 | 42215 | KONSTRUKSI TELEKOMUNIKASI NAVIGASI UDARA |
| 605 | 42216 | KONSTRUKSI SINYAL DAN TELEKOMUNIKASI KERETA API |
| 606 | 42217 | KONSTRUKSI SENTRAL TELEKOMUNIKASI |

| NO. | KODE | NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA |
|-----|-------|--|
| 607 | 42218 | PEMBUATAN/PENGEBORAN SUMUR AIR TANAH |
| 608 | 42219 | KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN ELEKTRIKAL DAN TELEKOMUNIKASI LAINNYA |
| 609 | 42220 | PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN IRIGASI, KOMUNIKASI DAN LIMBAH |
| 610 | 42911 | KONSTRUKSI BANGUNAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR |
| 611 | 42912 | KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN |
| 612 | 42913 | KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN |
| 613 | 42914 | KONSTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN DAN PENAMPUNGAN BARANG MINYAK DAN GAS |
| 614 | 42915 | PENGERUKAN |
| 615 | 42919 | KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL |
| 616 | 42920 | PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA |
| 617 | 43110 | PEMBONGKARAN |
| 618 | 43120 | PENYIAPAN LAHAN |
| 619 | 43211 | INSTALASI LISTRIK |
| 620 | 43212 | INSTALASI TELEKOMUNIKASI |
| 621 | 43213 | INSTALASI NAVIGASI LAUT DAN SUNGAI |
| 622 | 43214 | INSTALASI NAVIGASI UDARA |
| 623 | 43215 | INSTALASI SINYAL DAN TELEKOMUNIKASI KERETA API |
| 624 | 43216 | INSTALASI SINYAL DAN RAMBU-RAMBU JALAN RAYA |
| 625 | 43217 | INSTALASI ELEKTRONIKA |
| 626 | 43221 | INSTALASI AIR (PIPA) |
| 627 | 43222 | INSTALASI PEMANAS DAN GEOTERMAL |
| 628 | 43223 | INSTALASI MINYAK DAN GAS |
| 629 | 43224 | INSTALASI PENDINGIN DAN VENTILASI UDARA |
| 630 | 43291 | INSTALASI MEKANIKAL |
| 631 | 43299 | INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA YTDL |
| 632 | 43301 | PENGERJAAN PEMASANGAN KACA DAN ALUMINIUM |
| 633 | 43302 | PENGERJAAN LANTAI, DINDING, PERALATAN SANITER DAN PLAFON |
| 634 | 43303 | PENGECATAN |
| 635 | 43304 | DEKORASI INTERIOR |
| 636 | 43305 | DEKORASI EKSTERIOR |
| 637 | 43309 | PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN LAINNYA |
| 638 | 43901 | PEMASANGAN PONDASI DAN PILAR |
| 639 | 43902 | PEMASANGAN PERANCAH (STEIGER) |
| 640 | 43903 | PEMASANGAN ATAP/ROOF COVERING |
| 641 | 43904 | PEMASANGAN KERANGKA BAJA |
| 642 | 43905 | PENYEWAAN ALAT KONSTRUKSI DENGAN OPERATOR |
| 643 | 43909 | KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA YTDL |
| 644 | 45301 | PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL |
| 645 | 46100 | PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK |
| 646 | 46201 | PERDAGANGAN BESAR PADI DAN PALAWIJA |
| 647 | 46202 | PERDAGANGAN BESAR BUAH YANG MENGANDUNG MINYAK |
| 648 | 46203 | PERDAGANGAN BESAR BUNGA DAN TUMBUHAN |
| 649 | 46204 | PERDAGANGAN BESAR TEMBAKAU RAJANGAN |
| 650 | 46205 | PERDAGANGAN BESAR BINATANG HIDUP |
| 651 | 46206 | PERDAGANGAN BESAR HASIL PERIKANAN |
| 652 | 46207 | PERDAGANGAN BESAR HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN |
| 653 | 46208 | PERDAGANGAN BESAR KULIT DAN KULIT JANGAT |
| 654 | 46209 | PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP LAINNYA |
| 655 | 46311 | PERDAGANGAN BESAR BERAS |
| 656 | 46312 | PERDAGANGAN BESAR BUAH-BUAHAN |
| 657 | 46313 | PERDAGANGAN BESAR SAYURAN |
| 658 | 46314 | PERDAGANGAN BESAR KOPI, TEH DAN KAKAO |
| 659 | 46315 | PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK NABATI |

| NO. | KODE | NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA |
|-----|-------|--|
| 660 | 46319 | PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN LAINNYA |
| 661 | 46321 | PERDAGANGAN BESAR DAGING SAPI DAN DAGING SAPI OLAHAN |
| 662 | 46322 | PERDAGANGAN BESAR DAGING AYAM DAN DAGING AYAM OLAHAN |
| 663 | 46323 | PERDAGANGAN BESAR DAGING DAN DAGING OLAHAN LAINNYA |
| 664 | 46324 | PERDAGANGAN BESAR HASIL OLAHAN PERIKANAN |
| 665 | 46325 | PERDAGANGAN BESAR TELUR DAN HASIL OLAHAN TELUR |
| 666 | 46326 | PERDAGANGAN BESAR SUSU DAN PRODUK SUSU |
| 667 | 46327 | PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK HEWANI |
| 668 | 46331 | PERDAGANGAN BESAR GULA, COKLAT DAN KEMBANG GULA |
| 669 | 46332 | PERDAGANGAN BESAR PRODUK ROTI |
| 670 | 46333 | PERDAGANGAN BESAR MINUMAN BERALKOHOL |
| 671 | 46334 | PERDAGANGAN BESAR MINUMAN NON ALKOHOL BUKAN SUSU |
| 672 | 46335 | PERDAGANGAN BESAR ROKOK DAN TEMBAKAU |
| 673 | 46339 | PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA |
| 674 | 46411 | PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL |
| 675 | 46412 | PERDAGANGAN BESAR PAKAIAN |
| 676 | 46413 | PERDAGANGAN BESAR ALAS KAKI |
| 677 | 46414 | PERDAGANGAN BESAR BARANG LAINNYA DARI TEKSTIL |
| 678 | 46419 | PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI LAINNYA |
| 679 | 46421 | PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN GAMBAR |
| 680 | 46422 | PERDAGANGAN BESAR BARANG PERCETAKAN DAN PENERBITAN DALAM BERBAGAI BENTUK |
| 681 | 46430 | PERDAGANGAN BESAR ALAT FOTOGRAFI DAN BARANG OPTIK |
| 682 | 46491 | PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA |
| 683 | 46492 | PERDAGANGAN BESAR FARMASI |
| 684 | 46493 | PERDAGANGAN BESAR OBAT TRADISIONAL |
| 685 | 46494 | PERDAGANGAN BESAR KOSMETIK |
| 686 | 46495 | PERDAGANGAN BESAR ALAT OLAHRAGA |
| 687 | 46496 | PERDAGANGAN BESAR ALAT MUSIK |
| 688 | 46497 | PERDAGANGAN BESAR PERHIASAN DAN JAM |
| 689 | 46498 | PERDAGANGAN BESAR ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK-ANAK |
| 690 | 46499 | PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL |
| 691 | 46511 | PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER |
| 692 | 46512 | PERDAGANGAN BESAR PIRANTI LUNAK |
| 693 | 46521 | PERDAGANGAN BESAR PERLENGKAPAN ELEKTRONIK |
| 694 | 46522 | PERDAGANGAN BESAR DISKET, PITA AUDIO DAN VIDEO, CD DAN DVD KOSONG |
| 695 | 46523 | PERDAGANGAN BESAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI |
| 696 | 46530 | PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERTANIAN |
| 697 | 46591 | PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA |
| 698 | 46592 | PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI LAUT, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA |
| 699 | 46593 | PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI DARAT (BUKAN MOBIL, SEPEDA MOTOR, DAN SEJENISNYA), SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA |
| 700 | 46594 | PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI UDARA, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA |
| 701 | 46599 | PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA |
| 702 | 46610 | PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI |
| 703 | 46620 | PERDAGANGAN BESAR LOGAM DAN BIJIH LOGAM |
| 704 | 46631 | PERDAGANGAN BESAR BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI |
| 705 | 46632 | PERDAGANGAN BESAR KACA |
| 706 | 46633 | PERDAGANGAN BESAR GENTENG, BATU BATA, UBIN DAN SEJENISNYA DARI TANAH LIAT, KAPUR, SEMEN ATAU KACA |
| 707 | 46634 | PERDAGANGAN BESAR SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU |

| NO. | KODE | NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA |
|-----|-------|---|
| 708 | 46635 | PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI PORSELEN |
| 709 | 46636 | PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU |
| 710 | 46637 | PERDAGANGAN BESAR CAT |
| 711 | 46638 | PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN |
| 712 | 46639 | PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA |
| 713 | 46691 | PERDAGANGAN BESAR BAHAN DAN BARANG KIMIA DASAR |
| 714 | 46692 | PERDAGANGAN BESAR PUPUK DAN PRODUK AGROKIMIA |
| 715 | 46693 | PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KEDOKTERAN |
| 716 | 46694 | PERDAGANGAN BESAR KARET DAN PLASTIK DALAM BENTUK DASAR |
| 717 | 46695 | PERDAGANGAN BESAR KERTAS DAN KARTON |
| 718 | 46696 | PERDAGANGAN BESAR BARANG DARI KERTAS DAN KARTON |
| 719 | 46697 | PERDAGANGAN BESAR BARANG BEKAS DAN SISA-SISA TAK TERPAKAI (SCRAP) |
| 720 | 46699 | PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA TERMASUK BARANG SISA DAN POTONGAN YTDL PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG |
| 721 | 46900 | PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN MOTOR |
| 722 | 47111 | PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI SUPERMARKET/MINIMARKET |
| 723 | 47112 | PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU BUKAN DI SUPERMARKET/MINIMARKET (TRADISIONAL) |
| 724 | 47191 | PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI TOSERBA (DEPARTMENT STORE) |
| 725 | 47192 | PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU (BARANG-BARANG KELONTONG) BUKAN DI TOSERBA (DEPARTMENT STORE) |
| 726 | 47211 | PERDAGANGAN ECERAN PADI DAN PALAWIJA |
| 727 | 47212 | PERDAGANGAN ECERAN BUAH-BUAHAN |
| 728 | 47213 | PERDAGANGAN ECERAN SAYURAN |
| 729 | 47214 | PERDAGANGAN ECERAN HASIL PETERNAKAN |
| 730 | 47215 | PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERIKANAN |
| 731 | 47216 | PERDAGANGAN ECERAN HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN |
| 732 | 47219 | PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERTANIAN LAINNYA |
| 733 | 47221 | PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN BERALKOHOL |
| 734 | 47222 | PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN TIDAK BERALKOHOL |
| 735 | 47230 | PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ROKOK DAN TEMBAKAU DI TOKO |
| 736 | 47241 | PERDAGANGAN ECERAN BERAS |
| 737 | 47242 | PERDAGANGAN ECERAN ROTI, KUE KERING, SERTA KUE BASAH DAN SEJENISNYA |
| 738 | 47243 | PERDAGANGAN ECERAN KOPI, GULA PASIR DAN GULA MERAH |
| 739 | 47244 | PERDAGANGAN ECERAN TAHU, TEMPE, TAUCO DAN ONCOM |
| 740 | 47245 | PERDAGANGAN ECERAN DAGING DAN IKAN OLAHAN |
| 741 | 47249 | PERDAGANGAN ECERAN MAKANAN LAINNYA |
| 742 | 47301 | PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR KENDARAAN DI SPBU |
| 743 | 47302 | PERDAGANGAN ECERAN PREMIUM, PREMIX DAN SOLAR DI TOKO |
| 744 | 47411 | PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA |
| 745 | 47412 | PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN VIDEO GAME DAN SEJENISNYA |
| 746 | 47413 | PERDAGANGAN ECERAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE) |
| 747 | 47414 | PERDAGANGAN ECERAN ALAT TELEKOMUNIKASI |
| 748 | 47415 | PERDAGANGAN ECERAN MESIN KANTOR |
| 749 | 47420 | PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN AUDIO DAN VIDEO DI TOKO |
| 750 | 47511 | PERDAGANGAN ECERAN TEKSTIL |
| 751 | 47512 | PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI TEKSTIL |
| 752 | 47513 | PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN JAHIT MENJAHIT |
| 753 | 47521 | PERDAGANGAN ECERAN BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI |

| NO. | KODE | NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA |
|-----|-------|---|
| 754 | 47522 | PERDAGANGAN ECERAN KACA |
| 755 | 47523 | PERDAGANGAN ECERAN GENTENG, BATU BATA, UBIN DAN SEJENISNYA DARI TANAH LIAT, KAPUR, SEMEN ATAU KACA |
| 756 | 47524 | PERDAGANGAN ECERAN SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU |
| 757 | 47525 | PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI PORSELEN |
| 758 | 47526 | PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU |
| 759 | 47527 | PERDAGANGAN ECERAN CAT, PERNIS DAN LAK |
| 760 | 47528 | PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN |
| 761 | 47529 | PERDAGANGAN ECERAN BAHAN DAN BARANG KONSTRUKSI LAINNYA |
| 762 | 47530 | PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KARPET, PERMADANI DAN PENUTUP DINDING DAN LANTAI DI TOKO |
| 763 | 47591 | PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR |
| 764 | 47592 | PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN PERALATAN PENERANGAN DAN PERLENGKAPANNYA |
| 765 | 47593 | PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI PLASTIK |
| 766 | 47594 | PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI BATU ATAU TANAH LIAT |
| 767 | 47595 | PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI KAYU, BAMBU ATAU ROTAN |
| 768 | 47596 | PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR BUKAN DARI PLASTIK, BATU, TANAH LIAT, KAYU, BAMBU ATAU ROTAN |
| 769 | 47597 | PERDAGANGAN ECERAN ALAT MUSIK |
| 770 | 47599 | PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA DALAM SUBGOLONGAN 4759 |
| 771 | 47611 | PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR |
| 772 | 47612 | PERDAGANGAN ECERAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN |
| 773 | 47620 | PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS REKAMAN MUSIK DAN VIDEO DI TOKO |
| 774 | 47630 | PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN OLAHRAGA DI TOKO |
| 775 | 47640 | PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK-ANAK DI TOKO |
| 776 | 47650 | PERDAGANGAN ECERAN KERTAS, KERTAS KARTON DAN BARANG DARI KERTAS/KARTON |
| 777 | 47711 | PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN |
| 778 | 47712 | PERDAGANGAN ECERAN SEPATU, SANDAL DAN ALAS KAKI LAINNYA |
| 779 | 47713 | PERDAGANGAN ECERAN PELENGKAP PAKAIAN |
| 780 | 47714 | PERDAGANGAN ECERAN TAS, DOMPET, KOPER, RANSEL DAN SEJENISNYA |
| 781 | 47721 | PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KIMIA |
| 782 | 47722 | PERDAGANGAN ECERAN BARANG FARMASI DI APOTIK |
| 783 | 47723 | PERDAGANGAN ECERAN BARANG FARMASI BUKAN DI APOTIK |
| 784 | 47724 | PERDAGANGAN ECERAN OBAT TRADISIONAL |
| 785 | 47725 | PERDAGANGAN ECERAN KOSMETIK |
| 786 | 47726 | PERDAGANGAN ECERAN ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KESEHATAN |
| 787 | 47727 | PERDAGANGAN ECERAN AROMATIK/PENYEGAR (MINYAK ATSIRI) |
| 788 | 47729 | PERDAGANGAN ECERAN LAINNYA BUKAN YANG TERCAKUP PADA KELOMPOK 47721 S.D. 47727 |
| 789 | 47731 | PERDAGANGAN ECERAN ALAT FOTOGRAFI DAN PERLENGKAPANNYA |
| 790 | 47732 | PERDAGANGAN ECERAN ALAT OPTIK DAN PERLENGKAPANNYA |
| 791 | 47733 | PERDAGANGAN ECERAN KACA MATA |
| 792 | 47734 | PERDAGANGAN ECERAN JAM |
| 793 | 47735 | PERDAGANGAN ECERAN BARANG PERHIASAN |
| 794 | 47736 | PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR |
| 795 | 47737 | PERDAGANGAN ECERAN PEMBUNGKUS DARI PLASTIK |
| 796 | 47739 | PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BARU LAINNYA YTDL |
| 797 | 47741 | PERDAGANGAN ECERAN BARANG BEKAS PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA |

| NO. | KODE | NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA |
|-----|-------|--|
| 798 | 47742 | PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN, ALAS KAKI DAN PELENGKAP PAKAIAN BEKAS |
| 799 | 47743 | PERDAGANGAN ECERAN BARANG PERLENGKAPAN PRIBADI BEKAS |
| 800 | 47744 | PERDAGANGAN ECERAN BARANG LISTRIK DAN ELEKTRONIK BEKAS |
| 801 | 47745 | PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DAN SANITASI BEKAS |
| 802 | 47746 | PERDAGANGAN ECERAN BARANG ANTIK |
| 803 | 47749 | PERDAGANGAN ECERAN BARANG BEKAS LAINNYA |
| 804 | 47752 | PERDAGANGAN ECERAN HEWAN TERNAK |
| 805 | 47753 | PERDAGANGAN ECERAN IKAN HIAS |
| 806 | 47754 | PERDAGANGAN ECERAN PAKAN TERNAK/UNGGAS/IKAN DAN HEWAN PIARAAN |
| 807 | 47761 | PERDAGANGAN ECERAN BUNGA POTONG/FLORIST |
| 808 | 47762 | PERDAGANGAN ECERAN TANAMAN HIAS, BIBIT BUAH-BUAHAN DAN TANAMAN OBAT |
| 809 | 47763 | PERDAGANGAN ECERAN PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA |
| 810 | 47764 | PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN DAN MEDIA TANAMAN HIAS |
| 811 | 47781 | PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KAYU, BAMBU, ROTAN, PANDAN, RUMPUT DAN SEJENISNYA |
| 812 | 47782 | PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KULIT, TULANG, TANDUK, GADING, BULU DAN BINATANG/HEWAN YANG DIAWETKAN |
| 813 | 47783 | PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI LOGAM |
| 814 | 47784 | PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KERAMIK |
| 815 | 47785 | PERDAGANGAN ECERAN LUKISAN |
| 816 | 47789 | PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DAN LUKISAN LAINNYA |
| 817 | 47791 | PERDAGANGAN ECERAN MESIN PERTANIAN DAN PERLENGKAPANNYA |
| 818 | 47792 | PERDAGANGAN ECERAN MESIN JAHIT DAN PERLENGKAPANNYA |
| 819 | 47793 | PERDAGANGAN ECERAN MESIN LAINNYA DAN PERLENGKAPANNYA |
| 820 | 47794 | PERDAGANGAN ECERAN ALAT TRANSPORTASI DARAT TIDAK BERMOTOR DAN PERLENGKAPANNYA |
| 821 | 47795 | PERDAGANGAN ECERAN ALAT TRANSPORTASI AIR DAN PERLENGKAPANNYA |
| 822 | 47796 | PERDAGANGAN ECERAN ALAT-ALAT PERTANIAN |
| 823 | 47797 | PERDAGANGAN ECERAN ALAT-ALAT PERTUKANGAN |
| 824 | 47811 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI PADI DAN PALAWIJA |
| 825 | 47812 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI BUAH-BUAHAN |
| 826 | 47813 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI SAYUR-SAYURAN |
| 827 | 47814 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL PETERNAKAN |
| 828 | 47815 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL PERIKANAN |
| 829 | 47816 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN |
| 830 | 47819 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI TANAMAN HIAS DAN HASIL PERTANIAN LAINNYA |
| 831 | 47821 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BERAS |
| 832 | 47822 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ROTI, KUE KERING, KUE BASAH DAN SEJENISNYA |
| 833 | 47823 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOPI, GULA PASIR, GULA MERAH DAN SEJENISNYA |
| 834 | 47824 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TAHU, TEMPE, TAUCO DAN ONCOM |
| 835 | 47825 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR DAGING OLAHAN DAN BIOTA AIR OLAHAN |
| 836 | 47826 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MINUMAN |
| 837 | 47827 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ROKOK DAN TEMBAKAU |
| 838 | 47828 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAN TERNAK, PAKAN UNGGAS DAN PAKAN IKAN |

| NO. | KODE | NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA |
|-----|-------|---|
| 839 | 47829 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI MAKANAN DAN MINUMAN YTDL |
| 840 | 47831 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TEKSTIL |
| 841 | 47832 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAIAN |
| 842 | 47833 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR SEPATU, SANDAL DAN ALAS KAKI LAINNYA |
| 843 | 47834 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PELENGKAP PAKAIAN DAN BENANG |
| 844 | 47841 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN KIMIA |
| 845 | 47842 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR FARMASI |
| 846 | 47843 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR OBAT TRADISIONAL |
| 847 | 47844 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOSMETIK |
| 848 | 47845 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA |
| 849 | 47846 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR AROMATIK/PENYEGAR (MINYAK ATSIRI) |
| 850 | 47849 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN KIMIA, FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT LABORATORIUM DAN YBDI YTDL |
| 851 | 47851 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KACA MATA |
| 852 | 47852 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PERHIASAN |
| 853 | 47853 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR JAM |
| 854 | 47854 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TAS, DOMPET, KOPER, RANSEL DAN SEJENISNYA |
| 855 | 47855 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERLENGKAPAN PENGENDARA SEPEDA MOTOR |
| 856 | 47859 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG KEPERLUAN PRIBADI LAINNYA |
| 857 | 47861 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG ELEKTRONIK |
| 858 | 47862 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT DAN PERLENGKAPAN LISTRIK |
| 859 | 47863 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI PLASTIK/MELAMIN |
| 860 | 47864 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI BATU ATAU TANAH LIAT |
| 861 | 47865 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI KAYU, BAMBU ATAU ROTAN |
| 862 | 47866 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR BUKAN DARI PLASTIK, BATU, TANAH LIAT, KAYU, BAMBU ATAU ROTAN |
| 863 | 47867 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT KEBERSIHAN |
| 864 | 47869 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA |
| 865 | 47871 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KERTAS, KARTON DAN BARANG DARI KERTAS |
| 866 | 47872 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR |
| 867 | 47873 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR HASIL PENCETAKAN, PENERBITAN DAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE) |
| 868 | 47874 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT OLAHRAGA DAN ALAT MUSIK |
| 869 | 47875 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT FOTOGRAFI, ALAT OPTIK DAN PERLENGKAPANNYA |
| 870 | 47876 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MESIN KANTOR |
| 871 | 47877 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI |
| 872 | 47879 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR CAMPURAN KERTAS, KARTON, BARANG DARI KERTAS, ALAT TULIS-MENULIS, ALAT GAMBAR, HASIL PENCETAKAN, PENERBITAN DAN LAINNYA |
| 873 | 47881 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG KERAJINAN |
| 874 | 47882 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MAINAN ANAK-ANAK |
| 875 | 47883 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR LUKISAN |
| 876 | 47891 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR HEWAN HIDUP |
| 877 | 47892 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN BAKAR MINYAK, GAS, MINYAK PELUMAS DAN BAHAN BAKAR LAINNYA |

| NO. | KODE | NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA |
|-----|-------|---|
| 878 | 47893 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG ANTIK |
| 879 | 47894 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG BEKAS PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA |
| 880 | 47895 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAIAN, ALAS KAKI, PERLENGKAPAN PAKAIAN DAN BARANG PERLENGKAPAN PRIBADI BEKAS |
| 881 | 47896 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG LISTRIK DAN ELEKTRONIK BEKAS |
| 882 | 47897 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG BEKAS CAMPURAN |
| 883 | 47899 | PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG LAINNYA |
| 884 | 47911 | PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK KOMODITI MAKANAN, MINUMAN, TEMBAKAU, KIMIA, FARMASI KOSMETIK DAN ALAT LABORATORIUM |
| 885 | 47912 | PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK KOMODITI TEKSTIL, PAKAIAN, ALAS KAKI DAN BARANG KEPERLUAN PRIBADI |
| 886 | 47913 | PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK BARANG PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN DAPUR |
| 887 | 47914 | PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK BARANG CAMPURAN SEBAGAIMANA TERSEBUT DALAM 47911 S.D. 47913 |
| 888 | 47919 | PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK BERBAGAI MACAM BARANG LAINNYA |
| 889 | 47920 | PERDAGANGAN ECERAN ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK |
| 890 | 49111 | ANGKUTAN JALAN REL UNTUK PENUMPANG |
| 891 | 49112 | ANGKUTAN JALAN REL KHUSUS WISATA |
| 892 | 49121 | ANGKUTAN JALAN REL UNTUK BARANG |
| 893 | 49129 | ANGKUTAN JALAN REL KHUSUS LAINNYA |
| 894 | 49211 | ANGKUTAN BUS ANTARKOTA ANTARPROVINSI (AKAP) |
| 895 | 49212 | ANGKUTAN BUS PERBATASAN |
| 896 | 49213 | ANGKUTAN BUS ANTARKOTA DALAM PROVINSI (AKDP) |
| 897 | 49214 | ANGKUTAN BUS KOTA |
| 898 | 49215 | ANGKUTAN BUS LINTAS BATAS NEGARA |
| 899 | 49221 | ANGKUTAN BUS KHUSUS |
| 900 | 49222 | ANGKUTAN BUS PARIWISATA |
| 901 | 49300 | ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA |
| 902 | 49411 | ANGKUTAN PERBATASAN BUKAN BUS |
| 903 | 49412 | ANGKUTAN ANTARKOTA DALAM PROVINSI (AKDP) BUKAN BUS |
| 904 | 49413 | ANGKUTAN PERKOTAAN |
| 905 | 49414 | ANGKUTAN PERDESAAN |
| 906 | 49421 | ANGKUTAN TAKSI |
| 907 | 49422 | ANGKUTAN SEWA |
| 908 | 49423 | ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG |
| 909 | 49424 | ANGKUTAN OJEK MOTOR |
| 910 | 49425 | ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK WISATA |
| 911 | 49429 | ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK PENUMPANG |
| 912 | 49431 | ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM |
| 913 | 49432 | ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG KHUSUS |
| 914 | 49433 | ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM |
| 915 | 50111 | ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM LINER UNTUK PENUMPANG |
| 916 | 50112 | ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM TRAMPER UNTUK PENUMPANG |
| 917 | 50113 | ANGKUTAN LAUT DOMESTIK KHUSUS UNTUK WISATA |
| 918 | 50114 | ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PERINTIS UNTUK PENUMPANG |
| 919 | 50121 | ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM LINER UNTUK PENUMPANG |
| 920 | 50122 | ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM TRAMPER UNTUK PENUMPANG |
| 921 | 50123 | ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL KHUSUS UNTUK WISATA |
| 922 | 50131 | ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM LINER UNTUK BARANG |
| 923 | 50132 | ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM TRAMPER UNTUK BARANG |
| 924 | 50133 | ANGKUTAN LAUT DOMESTIK KHUSUS UNTUK BARANG |
| 925 | 50134 | ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PERINTIS UNTUK BARANG |

| NO. | KODE | NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA |
|-----|-------|---|
| 926 | 50135 | ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PELAYARAN RAKYAT |
| 927 | 50141 | ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM LINER UNTUK BARANG |
| 928 | 50142 | ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM TRAMPER UNTUK BARANG |
| 929 | 50143 | ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL KHUSUS UNTUK BARANG |
| 930 | 50144 | ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL PELAYARAN RAKYAT |
| 931 | 50211 | ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK PENUMPANG DENGAN TRAYEK TETAP DAN TERATUR |
| 932 | 50212 | ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK PENUMPANG DENGAN TRAYEK TIDAK TETAP DAN TIDAK |
| 933 | 50213 | ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU DENGAN TRAYEK TIDAK TETAP DAN TIDAK TERATUR UNTUK |
| 934 | 50214 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARPROVINSI UNTUK PENUMPANG |
| 935 | 50215 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK PENUMPANG |
| 936 | 50216 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG |
| 937 | 50217 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG |
| 938 | 50218 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG |
| 939 | 50219 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK PENUMPANG TERMASUK PENYEBERANGAN |
| 940 | 50222 | ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG KHUSUS |
| 941 | 50223 | ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG BERBAHAYA |
| 942 | 50224 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARPROVINSI UNTUK BARANG |
| 943 | 50225 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK BARANG |
| 944 | 50226 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG |
| 945 | 50227 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG |
| 946 | 50228 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG |
| 947 | 50229 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK BARANG TERMASUK PENYEBERANGAN |
| 948 | 51101 | ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DOMESTIK UMUM UNTUK PENUMPANG |
| 949 | 51102 | ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DOMESTIK PERINTIS UNTUK PENUMPANG |
| 950 | 51103 | ANGKUTAN UDARA BERJADWAL INTERNASIONAL UNTUK PENUMPANG |
| 951 | 51104 | ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL DOMESTIK UMUM UNTUK PENUMPANG |
| 952 | 51105 | ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL DOMESTIK PERINTIS UNTUK PENUMPANG |
| 953 | 51106 | ANGKUTAN UDARA KHUSUS OLAHRAGA |
| 954 | 51107 | ANGKUTAN UDARA KHUSUS UNTUK WISATA |
| 955 | 51109 | ANGKUTAN UDARA KHUSUS LAINNYA |
| 956 | 51201 | ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DOMESTIK UMUM UNTUK BARANG |
| 957 | 51202 | ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DOMESTIK PERINTIS UNTUK BARANG |
| 958 | 51203 | ANGKUTAN UDARA BERJADWAL INTERNASIONAL UNTUK BARANG |
| 959 | 51204 | ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL DOMESTIK UMUM UNTUK BARANG |
| 960 | 51205 | ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL DOMESTIK PERINTIS UNTUK BARANG |
| 961 | 52101 | PERGUDANGAN |
| 962 | 52102 | JASA COLD STORAGE |
| 963 | 52103 | JASA BOUNDED WAREHOUSING ATAU WILAYAH KAWASAN BERIKAT |
| 964 | 52109 | JASA PERGUDANGAN LAINNYA |
| 965 | 52211 | JASA TERMINAL DARAT |
| 966 | 52213 | JASA JALAN TOL |
| 967 | 52219 | JASA PENUNJANG ANGKUTAN DARAT LAINNYA |

| NO. | KODE | NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA |
|------|-------|--|
| 968 | 52221 | JASA PELAYANAN KEPELABUHANAN LAUT |
| 969 | 52222 | JASA PELAYANAN KEPELABUHANAN SUNGAI DAN DANAU |
| 970 | 52223 | JASA PELAYANAN KEPELABUHANAN PENYEBERANGAN |
| 971 | 52229 | JASA PENUNJANG ANGKUTAN AIR LAINNYA |
| 972 | 52230 | JASA KEBANDARUDARAAN |
| 973 | 52240 | PENANGANAN KARGO (BONGKAR MUAT BARANG) |
| 974 | 52291 | JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (JPT) |
| 975 | 52292 | JASA EKSPEDISI MUATAN KERETA API DAN EKSPEDISI ANGKUTAN DARAT (EMKA & EAD) |
| 976 | 52299 | JASA PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA YTDL |
| 977 | 53200 | KURIR |
| 978 | 55111 | HOTEL BINTANG LIMA |
| 979 | 55112 | HOTEL BINTANG EMPAT |
| 980 | 55113 | HOTEL BINTANG TIGA |
| 981 | 55114 | HOTEL BINTANG DUA |
| 982 | 55115 | HOTEL BINTANG SATU |
| 983 | 55120 | HOTEL MELATI |
| 984 | 55130 | PONDOK WISATA (HOME STAY) |
| 985 | 55191 | PENGINAPAN REMAJA (YOUTH HOSTEL) |
| 986 | 55192 | BUMI PERKEMAHAN |
| 987 | 55193 | PERSINGGAHAN KARAVAN |
| 988 | 55194 | VILA |
| 989 | 55195 | APARTEMEN HOTEL |
| 990 | 55199 | PENYEDIAAN AKOMODASI JANGKA PENDEK LAINNYA |
| 991 | 55900 | PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA |
| 992 | 56101 | RESTORAN |
| 993 | 56102 | WARUNG MAKAN |
| 994 | 56103 | KEDAI MAKANAN |
| 995 | 56104 | PENYEDIAAN MAKANAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP |
| 996 | 56210 | JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING) |
| 997 | 56290 | PENYEDIAAN MAKANAN LAINNYA |
| 998 | 56301 | BAR |
| 999 | 56302 | KELAB MALAM ATAU DISKOTIK YANG UTAMANYA MENYEDIAKAN MINUMAN |
| 1000 | 56303 | RUMAH MINUM/KAFE |
| 1001 | 56304 | KEDAI MINUMAN |
| 1002 | 56305 | RUMAH/KEDAI OBAT TRADISIONAL |
| 1003 | 56306 | PENYEDIAAN MINUMAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP |
| 1004 | 58110 | PENERBITAN BUKU |
| 1005 | 58120 | PENERBITAN BUKU DIREKTORI DAN MAILING LIST |
| 1006 | 58130 | PENERBITAN SURAT KABAR, JURNAL, BULETIN DAN MAJALAH |
| 1007 | 58190 | PENERBITAN LAINNYA |
| 1008 | 58200 | PENERBITAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE) |
| 1009 | 59111 | PRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH PEMERINTAH |
| 1010 | 59112 | PRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH SWASTA |
| 1011 | 59121 | PASCA PRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH PEMERINTAH |
| 1012 | 59122 | PASCA PRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH SWASTA |
| 1013 | 59131 | DISTRIBUSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH PEMERINTAH |
| 1014 | 59132 | DISTRIBUSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH SWASTA |
| 1015 | 59140 | KEGIATAN PEMUTARAN FILM |
| 1016 | 59201 | PEREKAMAN SUARA |
| 1017 | 59202 | PENERBITAN MUSIK DAN BUKU MUSIK |
| 1018 | 60101 | PENYIARAN RADIO OLEH PEMERINTAH |
| 1019 | 60102 | PENYIARAN RADIO OLEH SWASTA |
| 1020 | 60201 | PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN TELEVISI OLEH PEMERINTAH |
| 1021 | 60202 | PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN TELEVISI OLEH SWASTA |

| NO. | KODE | NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA |
|------|-------|---|
| 1022 | 61100 | TELEKOMUNIKASI DENGAN KABEL |
| 1023 | 61200 | TELEKOMUNIKASI TANPA KABEL |
| 1024 | 61300 | TELEKOMUNIKASI SATELIT |
| 1025 | 61911 | JASA PANGGILAN PREMIUM (PREMIUM CALL) |
| 1026 | 61912 | JASA RADIO PANGGIL UNTUK UMUM (RPUU) |
| 1027 | 61913 | JASA RADIO TRUNKING |
| 1028 | 61914 | WARUNG TELEKOMUNIKASI (WARTEL) |
| 1029 | 61919 | JASA NILAI TAMBAH TELEPONI LAINNYA |
| 1030 | 61921 | INTERNET SERVICE PROVIDER |
| 1031 | 61922 | JASA SISTEM KOMUNIKASI |
| 1032 | 61923 | JASA VOICE OVER INTERNET PROTOCOL (VOIP) |
| 1033 | 61924 | WARUNG INTERNET (WARNET) |
| 1034 | 61929 | JASA MULTIMEDIA LAINNYA |
| 1035 | 61991 | TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK PENYIARAN |
| 1036 | 61999 | TELEKOMUNIKASI LAINNYA YTDL |
| 1037 | 62010 | KEGIATAN PEMROGRAMAN KOMPUTER |
| 1038 | 62090 | KEGIATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA KOMPUTER LAINNYA |
| 1039 | 63111 | KEGIATAN PENGOLAHAN DATA |
| 1040 | 63120 | PORTAL WEB |
| 1041 | 63911 | KEGIATAN KANTOR BERITA OLEH PEMERINTAH |
| 1042 | 63912 | KEGIATAN KANTOR BERITA OLEH SWASTA |
| 1043 | 64140 | KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM |
| 1044 | 64922 | PEMBIAYAAN KONSUMEN (CONSUMERS CREDIT) |
| 1045 | 64999 | JASA KEUANGAN LAINNYA YTDL, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN |
| 1046 | 65111 | ASURANSI JIWA KONVENSIONAL |
| 1047 | 65112 | ASURANSI JIWA SYARIAH |
| 1048 | 65121 | ASURANSI NON JIWA KONVENSIONAL |
| 1049 | 65122 | ASURANSI NON JIWA SYARIAH |
| 1050 | 66197 | JASA PENUKARAN MATA UANG (MONEY CHANGER) |
| 1051 | 66199 | JASA PENUNJANG JASA KEUANGAN LAINNYA YTDL |
| 1052 | 66221 | JASA AGEN ASURANSI |
| 1053 | 68110 | REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA |
| 1054 | 68120 | KAWASAN PARIWISATA |
| 1055 | 68200 | REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK |
| 1056 | 69100 | JASA HUKUM |
| 1057 | 69200 | JASA AKUNTANSI, PEMBUKUAN DAN PEMERIKSA; KONSULTASI PAJAK |
| 1058 | 70201 | JASA KONSULTAN PARIWISATA |
| 1059 | 70202 | JASA KONSULTAN TRANSPORTASI |
| 1060 | 70209 | KEGIATAN KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA |
| 1061 | 71100 | JASA ARSITEKUR DAN TEKNIK SIPIL SERTA KONSULTASI TEKNIS YBDI |
| 1062 | 71202 | JASA PENGUJIAN LABORATORIUM |
| 1063 | 71203 | JASA INSPEKSI |
| 1064 | 71204 | JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI |
| 1065 | 71205 | JASA KALIBRASI/METROLOGI |
| 1066 | 71209 | JASA ANALISIS DAN UJI TEKNIS LAINNYA |
| 1067 | 72102 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU TEKNOLOGI DAN REKAYASA |
| 1068 | 72201 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL |
| 1069 | 72202 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUMANIORA |
| 1070 | 73100 | PERIKLANAN |
| 1071 | 73200 | PENELITIAN PASAR DAN JAJAK PENDAPAT MASYARAKAT |
| 1072 | 74100 | JASA PERANCANGAN KHUSUS |
| 1073 | 74201 | JASA FOTOGRAFI |
| 1074 | 74902 | JASA KONSULTASI BISNIS DAN BROKER BISNIS |
| 1075 | 77100 | JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA |

| NO. | KODE | NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA |
|------|-------|--|
| 1076 | 77210 | JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT REKREASI DAN OLAHRAGA |
| 1077 | 77295 | JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT MUSIK |
| 1078 | 77301 | JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI |
| 1079 | 77302 | JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI DARAT BUKAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH |
| 1080 | 77303 | JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI AIR |
| 1081 | 77304 | JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI UDARA |
| 1082 | 77306 | JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN KONSTRUKSI DAN TEKNIK SIPIL |
| 1083 | 77400 | SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ASET NON FINANSIAL, BUKAN KARYA HAK CIPTA |
| 1084 | 78101 | JASA PENYELEKSIAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI |
| 1085 | 78102 | JASA PENYELEKSIAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI |
| 1086 | 78103 | JASA PENYALURAN TENAGA KERJA |
| 1087 | 78200 | JASA PENYEDIAAN TENAGA KERJA WAKTU TERTENTU |
| 1088 | 78300 | JASA PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MANAJEMEN FUNGSI SUMBER DAYA MANUSIA |
| 1089 | 79111 | JASA AGEN PERJALANAN WISATA |
| 1090 | 79112 | JASA AGEN PERJALANAN BUKAN WISATA |
| 1091 | 79120 | JASA BIRO PERJALANAN WISATA |
| 1092 | 79910 | JASA INFORMASI PARIWISATA |
| 1093 | 79920 | JASA PRAMUWISATA |
| 1094 | 79990 | JASA RESERVASI LAINNYA YBDI YTDL |
| 1095 | 82301 | JASA PENYELENGGARA PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN |
| 1096 | 82302 | JASA EVENT ORGANIZER |
| 1097 | 82920 | JASA PENGEPAKAN |
| 1098 | 85111 | JASA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH PEMERINTAH |
| 1099 | 85112 | JASA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH PEMERINTAH |
| 1100 | 85121 | JASA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA |
| 1101 | 85122 | JASA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA |
| 1102 | 85210 | JASA PENDIDIKAN MENENGAH UMUM/MADRASAH ALIYAH PEMERINTAH |
| 1103 | 85220 | JASA PENDIDIKAN MENENGAH UMUM/MADRASAH ALIYAH SWASTA |
| 1104 | 85230 | JASA PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DAN TEKNIK/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN PEMERINTAH |
| 1105 | 85240 | JASA PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DAN TEKNIK/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN SWASTA |
| 1106 | 85311 | JASA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM GELAR PEMERINTAH |
| 1107 | 85312 | JASA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM NON GELAR PEMERINTAH |
| 1108 | 85321 | JASA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM GELAR SWASTA |
| 1109 | 85322 | JASA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM NON GELAR SWASTA |
| 1110 | 85410 | JASA PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN REKREASI |
| 1111 | 85420 | JASA PENDIDIKAN KEBUDAYAAN |
| 1112 | 85430 | JASA PENDIDIKAN LAINNYA PEMERINTAH |
| 1113 | 85491 | JASA PENDIDIKAN MANAJEMEN DAN PERBANKAN |
| 1114 | 85492 | JASA PENDIDIKAN KOMPUTER (TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI) SWASTA |
| 1115 | 85493 | JASA PENDIDIKAN BAHASA SWASTA |
| 1116 | 85494 | JASA PENDIDIKAN KESEHATAN SWASTA |
| 1117 | 85495 | JASA PENDIDIKAN BIMBINGAN BELAJAR DAN KONSELING SWASTA |

| NO. | KODE | NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA |
|------|-------|---|
| 1118 | 85496 | JASA PENDIDIKAN AWAK PESAWAT DAN JASA ANGKUTAN UDARA KHUSUS PENDIDIKAN AWAK PESAWAT |
| 1119 | 85497 | JASA PENDIDIKAN TEKNIK SWASTA |
| 1120 | 85498 | JASA PENDIDIKAN KERAJINAN DAN INDUSTRI |
| 1121 | 85499 | JASA PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA |
| 1122 | 85500 | JASA PENUNJANG PENDIDIKAN |
| 1123 | 85601 | JASA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK PEMERINTAH |
| 1124 | 85602 | JASA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL |
| 1125 | 85603 | JASA PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN SWASTA |
| 1126 | 85604 | JASA PENDIDIKAN TAMAN PENITIPAN ANAK |
| 1127 | 86101 | JASA RUMAH SAKIT PEMERINTAH |
| 1128 | 86102 | JASA PUSKESMAS |
| 1129 | 86103 | JASA RUMAH SAKIT SWASTA |
| 1130 | 86104 | JASA POLIKLINIK SWASTA |
| 1131 | 86109 | JASA RUMAH SAKIT LAINNYA |
| 1132 | 86201 | PRAKTIK DOKTER UMUM |
| 1133 | 86202 | PRAKTIK DOKTER SPESIALIS |
| 1134 | 86203 | PRAKTIK DOKTER GIGI |
| 1135 | 86901 | JASA PELAYANAN KESEHATAN YANG DILAKUKAN OLEH PARAMEDIS |
| 1136 | 86902 | JASA PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL |
| 1137 | 86903 | JASA PELAYANAN PENUNJANG KESEHATAN |
| 1138 | 86904 | JASA ANGKUTAN KHUSUS PENGANGKUTAN ORANG SAKIT (MEDICAL EVACUATION) |
| 1139 | 90001 | KEGIATAN SENI PERTUNJUKAN |
| 1140 | 90002 | KEGIATAN PEKERJA SENI |
| 1141 | 90003 | JASA PENUNJANG HIBURAN |
| 1142 | 90004 | JASA IMPRESARIAT BIDANG SENI |
| 1143 | 90005 | JURNALIS BERITA INDEPENDEN |
| 1144 | 90009 | KEGIATAN HIBURAN, SENI DAN KREATIVITAS LAINNYA |
| 1145 | 91021 | MUSEUM YANG DIKELOLA PEMERINTAH |
| 1146 | 91022 | MUSEUM YANG DIKELOLA SWASTA |
| 1147 | 91023 | PENINGGALAN SEJARAH YANG DIKELOLA PEMERINTAH |
| 1148 | 91024 | PENINGGALAN SEJARAH YANG DIKELOLA SWASTA |
| 1149 | 91025 | TAMAN BUDAYA |
| 1150 | 91029 | WISATA BUDAYA LAINNYA |
| 1151 | 91031 | KEGIATAN TAMAN KONSERVASI ALAM |
| 1152 | 91032 | TAMAN NASIONAL (TN) |
| 1153 | 91033 | TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA) |
| 1154 | 91034 | TAMAN WISATA ALAM (TWA) |
| 1155 | 91035 | HUTAN LINDUNG (HL), SUAKA MARGASATWA (SM), DAN CAGAR ALAM (CA) |
| 1156 | 91036 | TAMAN LAUT |
| 1157 | 91037 | TAMAN BURU DAN KEBUN BURU |
| 1158 | 91039 | KEGIATAN TAMAN KONSERVASI ALAM LAINNYA |
| 1159 | 93112 | LAPANGAN GOLF |
| 1160 | 93113 | GELANGGANG BOWLING |
| 1161 | 93114 | GELANGGANG RENANG |
| 1162 | 93115 | LAPANGAN SEPAK BOLA |
| 1163 | 93116 | LAPANGAN TENIS LAPANGAN |
| 1164 | 93117 | KEGIATAN PUSAT KEBUGARAN/FITNESS CENTER |
| 1165 | 93118 | SPORT CENTRE |
| 1166 | 93119 | KEGIATAN FASILITAS OLAAHRAGA LAINNYA |
| 1167 | 93191 | PROMOTOR KEGIATAN OLAAHRAGA |
| 1168 | 93193 | KEGIATAN PERBURUAN |
| 1169 | 93199 | KEGIATAN LAINNYA YANG BERKAITAN DENGAN OLAAHRAGA |
| 1170 | 93210 | KEGIATAN TAMAN BERTEMA ATAU TAMAN HIBURAN |
| 1171 | 93221 | PEMANDIAN ALAM |

| NO. | KODE | NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA |
|------|-------|---|
| 1172 | 93222 | WISATA GUA |
| 1173 | 93223 | WISATA PETUALANGAN ALAM |
| 1174 | 93229 | DAYA TARIK WISATA ALAM LAINNYA |
| 1175 | 93231 | WISATA AGRO |
| 1176 | 93232 | TAMAN REKREASI/TAMAN WISATA |
| 1177 | 93233 | KOLAM PEMANCINGAN |
| 1178 | 93239 | DAYA TARIK WISATA BUATAN/BINAAN MANUSIA LAINNYA |
| 1179 | 93241 | ARUNG JERAM |
| 1180 | 93242 | WISATA SELAM |
| 1181 | 93243 | DERMAGA MARINA |
| 1182 | 93249 | WISATA TIRTA LAINNYA |
| 1183 | 93292 | KARAOKE KELUARGA |
| 1184 | 93293 | USAHA ARENA PERMAINAN |
| 1185 | 93299 | KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI LAINNYA YTDL |
| 1186 | 96111 | JASA PANGKAS RAMBUT |
| 1187 | 96112 | JASA SALON KECANTIKAN |
| 1188 | 96122 | SPA (SANTE PAR AQUA) |
| 1189 | 96129 | JASA KEBUGARAN LAINNYA |

B. CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH

1. Tuan A (K/1) pegawai tetap di PT Z (industri makanan bayi/KLU 10791), pada bulan Januari 2021 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp16.500.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp330.000,00.

Penghasilan bruto Tuan A yang disetahunkan Rp198.000.000,00 (Rp16.500.000,00 x 12). Karena masih dibawah Rp200.000.000,00 maka Tuan A dapat memperoleh insentif PPh Pasal 21 DTP.

- a. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang bulan Januari 2021:

| | |
|---|---------------------|
| Gaji dan tunjangan | Rp 16.500.000,00 |
| Pengurangan: | |
| Biaya Jabatan/bulan | Rp500.000,00 |
| Iuran Pensiun/bulan | <u>Rp330.000,00</u> |
| | (Rp 830.000,00) |
| Penghasilan Neto Sebulan | Rp 15.670.000,00 |
| Penghasilan Neto Setahun | |
| 12 x Rp15.670.000,00 | Rp188.040.000,00 |
| PTKP (K/1) | (Rp 63.000.000,00) |
| Penghasilan Kena Pajak Setahun | Rp125.040.000,00 |
| PPh Pasal 21 Terutang Setahun | |
| 5% x Rp50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00 | |
| 15% x Rp75.040.000,00 = <u>Rp 11.256.000,00</u> | |
| | Rp 13.756.000,00 |
| PPh Pasal 21 Terutang Sebulan | |
| Rp13.756.000,00/12 | Rp 1.146.333,00 |

- b. Besarnya penghasilan yang diterima Tuan A bulan Januari 2021:

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Gaji dan tunjangan | Rp16.500.000,00 |
| Dikurangi iuran pensiun/bulan | (Rp 330.000,00) |
| Dikurangi PPh Pasal 21 | (Rp 1.146.333,00) |
| Penghasilan setelah pajak | Rp 15.023.667,00 |
| Ditambah PPh Pasal 21 DTP | <u>Rp 1.146.333,00</u> |
| Jumlah yang diterima | Rp16.170.000,00 |

2. Tuan B (K/0) pegawai tetap di PT Z (industri makanan bayi/KLU 10791), pada bulan Februari 2021 menerima gaji dan tunjangan

sebesar Rp21.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp420.000,00.

Penghasilan bruto Tuan B yang disetahunkan Rp252.000.000,00 (Rp21.000.000,00 x 12). Karena telah melebihi Rp200.000.000,00 maka seluruh PPh Pasal 21 terutang pada bulan Februari 2021 tidak dapat memperoleh insentif PPh Pasal 21 DTP. Atas penghasilan tersebut PPh Pasal 21 dipotong dan disetor oleh pemberi kerja.

3. Tuan C (K/1) pegawai tetap di PT Z (industri makanan bayi/KLU 10791), pada bulan Februari 2021 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp15.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp300.000,00, serta menerima Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp10.000.000,00.

Penghasilan bruto Tuan C yang bersifat tetap dan teratur berupa gaji dan tunjangan sebesar Rp15.000.000,00 sebulan yang disetahunkan sebesar Rp180.000.000,00 (Rp15.000.000,00 x 12). Karena masih dibawah Rp200.000.000,00 maka penghasilan Tuan C yang dapat memperoleh insentif PPh Pasal 21 DTP hanya atas penghasilan gaji dan tunjangan bulanan.

a. Penghitungan PPh Pasal 21 DTP bulan Februari 2021:

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Gaji dan tunjangan | Rp 15.000.000,00 |
| Pengurangan: | |
| Biaya Jabatan/bulan | Rp500.000,00 |
| Iuran Pensiun/bulan | <u>Rp300.000,00</u> |
| | (Rp 800.000,00) |
| Penghasilan Neto Sebulan | Rp 14.200.000,00 |
| Penghasilan Neto Setahun | |
| 12 x Rp14.200.000,00 | Rp170.400.000,00 |
| PTKP (K/1) | (Rp 63.000.000,00) |
| Penghasilan Kena Pajak Setahun | Rp107.400.000,00 |
| PPh Pasal 21 Terutang Setahun | |
| 5% x Rp50.000.000,00 = | Rp 2.500.000,00 |
| 15% x Rp57.400.000,00 = | <u>Rp 8.610.000,00</u> |
| | Rp 11.110.000,00 |
| PPh Pasal 21 Terutang Sebulan | |
| Rp11.110.000,00/12 | Rp 925.833,00 |

Atas PPh Pasal 21 DTP sebesar Rp925.833,00 diserahkan oleh pemberi kerja kepada Tuan C.

b. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas THR bulan Februari 2021:

| | |
|---|---------------------------|
| Gaji dan tunjangan setahun | Rp 180.000.000,00 |
| THR | <u>Rp 10.000.000,00</u> |
| Penghasilan bruto | Rp 190.000.000,00 |
| Pengurangan: | |
| Biaya Jabatan setahun maksimal | Rp6.000.000,00 |
| Iuran Pensiun setahun | <u>Rp3.600.000,00</u> |
| | <u>(Rp 9.600.000,00)</u> |
| Penghasilan Neto | Rp180.400.000,00 |
| PTKP (K/1) | <u>(Rp 63.000.000,00)</u> |
| Penghasilan Kena Pajak Setahun | Rp117.400.000,00 |
| PPh Pasal 21 Terutang Setahun | |
| 5% x Rp50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00 | |
| 15% x Rp67.400.000,00 = <u>Rp10.110.000,00</u> | |
| | Rp 12.610.000,00 |
| PPh Pasal 21 atas THR: | |
| PPh 21 atas seluruh penghasilan (Gaji, tunjangan, dan THR) | Rp 12.610.000,00 |
| PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap (Gaji dan tunjangan) | <u>(Rp 11.110.000,00)</u> |
| PPh Pasal 21 atas THR | Rp 1.500.000,00 |
| Pemberi kerja memotong dan menyetorkan PPh Pasal 21 atas THR Tuan C sebesar Rp1.500.000,00. | |

c. Besarnya penghasilan yang diterima Tuan C bulan Februari 2021:

| | |
|---|--------------------------|
| Gaji dan tunjangan | Rp 15.000.000,00 |
| THR | Rp 10.000.000,00 |
| Dikurangi iuran pensiun/bulan | (Rp 300.000,00) |
| Dikurangi PPh Pasal 21 atas seluruh penghasilan | <u>(Rp 2.425.833,00)</u> |
| Penghasilan setelah pajak | Rp 22.274.167,00 |

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Ditambah PPh Pasal 21 DTP | Rp <u>925.833,00</u> |
| Jumlah yang diterima | Rp 23.200.000,00 |

4. Tuan D (K/1) pegawai tetap di PT X (industri kaca mata/KLU 32503), pada bulan Januari 2021 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp15.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp300.000,00. PT X memberikan tunjangan PPh Pasal 21 kepada Tuan D sebesar Rp1.000.000,00.

Penghasilan bruto Tuan D yang disetahunkan Rp192.000.000,00 ((Rp15.000.000,00 + Rp1.000.000,00) x 12). Karena masih dibawah Rp200.000.000,00 maka Tuan D dapat memperoleh insentif PPh Pasal 21 DTP.

- a. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang bulan Januari 2021:

| | |
|---|---------------------------|
| Gaji dan tunjangan | Rp 15.000.000,00 |
| Tunjangan PPh Pasal 21 | <u>Rp 1.000.000,00</u> |
| Penghasilan bruto | Rp 16.000.000,00 |
| Pengurangan: | |
| Biaya Jabatan | Rp500.000,00 |
| Iuran Pensiun | <u>Rp300.000,00</u> |
| | <u>(Rp 800.000,00)</u> |
| Penghasilan Neto Sebulan | Rp 15.200.000,00 |
| Penghasilan Neto Setahun | |
| 12 x Rp15.200.000,00 | Rp 182.400.000,00 |
| PTKP (K/1) | <u>(Rp 63.000.000,00)</u> |
| Penghasilan Kena Pajak Setahun | Rp119.400.000,00 |
| PPh Pasal 21 Terutang Setahun | |
| 5% x Rp50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00 | |
| 15% x Rp69.400.000,00 = <u>Rp 10.410.000,00</u> | |
| | Rp 12.910.000,00 |
| PPh Pasal 21 Terutang Sebulan | |
| Rp12.910.000,00/12 | Rp 1.075.833,00 |

- b. Besarnya penghasilan yang diterima Tuan D bulan Januari 2021:

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Gaji dan tunjangan | Rp15.000.000,00 |
| Tunjangan PPh | Rp 1.000.000,00 |
| Dikurangi iuran pensiun/bulan | (Rp 300.000,00) |
| Dikurangi PPh Pasal 21 | <u>(Rp 1.075.833,00)</u> |

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Penghasilan setelah pajak | Rp14.624.167,00 |
| Ditambah PPh Pasal 21 DTP | <u>Rp 1.075.833,00</u> |
| Jumlah yang diterima | Rp15.700.000,00 |

C. CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN PEMANFAATAN INSENTIF PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25

Nomor : (1)

Hal : Pemberitahuan Pemanfaatan Insentif PPh
Pasal 21 ditanggung Pemerintah (DTP) dan/atau
Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

..... (2)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (3)

NPWP : (4)

Jabatan : (5)

Bertindak selaku pengurus dari Wajib Pajak:

Nama : (6)

NPWP : (7)

Kode KLU : (8)

Alamat : (9)

memberitahukan: (10)

Pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP

Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang
terutang sebesar 50%

sebagaimana diatur dalam PMK Nomor ... /PMK.03/2021 untuk Masa
Pajak 2021 sampai dengan 2021.

Demikian disampaikan.

.....,20.... (11)

(12)

..... (13)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PEMANFAATAN
INSENTIF PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU
PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25 WAJIB PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Pemanfaatan PPh Pasal 21 DTP dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran Pasal 25 Wajib Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak atau pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
- Nomor (4) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak atau pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
- Nomor (5) : Diisi dengan jabatan pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan Kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan menandai kotak sesuai permohonan yang diajukan.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Pemanfaatan PPh Pasal 21 DTP dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanda tangan dan cap Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama Wajib Pajak atau pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).

D. CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN BERHAK MEMANFAATKAN INSENTIF PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

Nomor :(2)

Perihal : Pemberitahuan Berhak Memanfaatkan Insentif
PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah (DTP) dan/atau
Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25

Kepada Yth. (3)

Berkenaan dengan surat pemberitahuan yang Saudara ajukan Nomor(4) tanggal(5) dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomortentang..., Saudara berhak untuk memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25*), dengan alasan:

- termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha sesuai Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang ...
- termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha sesuai Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang ...

Demikian kami sampaikan.

....., 20.... (6)

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak

..... (7)

Tanda Tangan

..... (8)



*) Pilih yang sesuai

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN BERHAK
MEMANFAATKAN INSENTIF PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH
DAN/ATAU PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25

- Nomor (1) : Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan Surat Pemberitahuan Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal penerbitan Surat Pemberitahuan Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.
- Nomor (7) : Diisi dengan KPP yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama kepala KPP yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.

E. CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK BERHAK MEMANFAATKAN
INSENTIF PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU
PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

Nomor :(2)

Perihal : Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif
PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah (DTP) dan/atau
Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25

Kepada Yth.

..... (3)

Berkenaan dengan surat pemberitahuan yang Saudara ajukan
Nomor (4) tanggal (5) dengan ini diberitahukan bahwa
berdasarkan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor tentang ..., Saudara tidak berhak untuk memanfaatkan
Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran
PPh Pasal 25*), dengan alasan:

tidak termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha sesuai Surat
Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha
(KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif PPh Pasal 21
Ditanggung Pemerintah (DTP) Peraturan Menteri Keuangan Nomor
... tentang ...

tidak termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha sesuai Surat
Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha
(KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengurangan
Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan
Nomor ... tentang ...

Demikian kami sampaikan.

....., 20.... (6)

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak

..... (7)

Tanda Tangan

..... (8)



*) pilih yang sesuai

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK BERHAK
MEMANFAATKAN INSENTIF PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH
DAN/ATAU PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25

- Nomor (1) : Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan Surat Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal penerbitan Surat Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.
- Nomor (7) : Diisi dengan KPP yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama kepala KPP yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.

F. FORMULIR LAPORAN REALISASI PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH

LAPORAN REALISASI PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

Status Laporan Realisasi : Normal Pembetulan *)

Wajib Pajak Pemberi Kerja : (1)
NPWP : (2)
Kode KLU : (3)
Masa Pajak : (4)

| | |
|--|-----------------|
| Jumlah pegawai yang berhak menerima PPh Pasal 21 DTP | orang (5) |
| Jumlah Penghasilan Bruto Masa Pajak 2021 (6) | Rp (7) |
| Jumlah PPh Pasal 21 DTP Masa Pajak 2021 (8) | Rp (9) |

Daftar pegawai yang telah menerima PPh Pasal 21 DTP:

| No. (10) | Nama Pegawai (11) | NPWP (12) | Jumlah (Rp) (13) | |
|-------------|----------------------|--------------|------------------|------------------|
| | | | Pengh. Bruto | PPh Pasal 21 DTP |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Jumlah | | | (7) | (9) |

Demikian laporan disampaikan.

....., 20.... (14)

(15)

..... (16)

NPWP: (17)

*) pilih salah satu

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR LAPORAN REALISASI
PPH PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak Pemberi Kerja.
- Nomor (2) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Pemberi Kerja.
- Nomor (3) : Diisi dengan Kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan Masa Pajak sesuai periode pelaporan.
- Nomor (5) : Diisi dengan jumlah pegawai yang berhak menerima PPh Pasal 21 DTP dalam Masa Pajak periode pelaporan.
- Nomor (6) : Diisi dengan Masa Pajak sesuai periode pelaporan.
- Nomor (7) : Diisi dengan jumlah Rupiah Penghasilan Bruto yang diterima pegawai yang berhak menerima PPh Pasal 21 DTP dalam Masa Pajak periode pelaporan.
- Nomor (8) : Diisi dengan Masa Pajak sesuai periode pelaporan.
- Nomor (9) : Diisi dengan jumlah Rupiah PPh Pasal 21 DTP dalam Masa Pajak periode pelaporan yang diberikan secara tunai kepada masing-masing pegawai yang berhak.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama pegawai yang berhak menerima PPh Pasal 21 DTP dalam setiap Masa Pajak periode pelaporan.
- Nomor (12) : Diisi dengan NPWP yang lengkap dan valid dari pegawai yang berhak menerima PPh Pasal 21 DTP dalam setiap Masa Pajak periode pelaporan.
- Nomor (13) : Diisi dengan jumlah Rupiah Penghasilan Bruto dan PPh Pasal 21 DTP hasil perhitungan yang benar tiap pegawai dalam setiap Masa Pajak periode pelaporan.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal laporan.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanda tangan dan cap Wajib Pajak Pemberi Kerja atau Pengurus.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama Wajib Pajak Pemberi Kerja atau Pengurus (bagi Wajib Pajak Badan).
- Nomor (17) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Pemberi Kerja atau Pengurus (bagi Wajib Pajak Badan).

G. CONTOH PENGHITUNGAN PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH

1. Tuan N memiliki usaha rumah makan. Tuan N terdaftar sebagai Wajib Pajak pada tanggal 1 Desember 2020 dan tidak menyampaikan pemberitahuan untuk dikenai PPh Berdasarkan Ketentuan Umum Undang-Undang PPh. Pada Tahun Pajak 2020, Tuan N memperoleh peredaran bruto dari usaha rumah makan sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Karena peredaran bruto yang diterima oleh Tuan N dari usaha rumah makan tersebut tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak, maka penghasilan dari usaha rumah makan untuk Tahun Pajak 2021 dikenai PPh final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Tuan N menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha rumah makan sebagai berikut:

| Masa Pajak | Peredaran Bruto | PPh Final Terutang |
|--------------|------------------|--------------------|
| Januari 2021 | Rp 40.500.000,00 | Rp 202.500,00 |

Atas PPh final Masa Pajak Januari 2021 tersebut Tuan N berhak memperoleh insentif PPh final ditanggung Pemerintah dengan cara menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah melalui saluran tertentu paling lambat tanggal 20 Februari 2021, sehingga Tuan N tidak menyetor PPh final ke kas negara.

Dalam hal Tuan N tidak menyampaikan laporan realisasi atau menyampaikan laporan realisasi Masa Pajak Januari 2021 melewati batas waktu yang ditetapkan maka Tuan N tidak dapat memanfaatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah untuk Masa Pajak yang bersangkutan dan wajib menyetorkan sendiri PPh final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang menjadi kewajibannya.

2. PT XYZ memiliki usaha bengkel mobil dan terdaftar sebagai Wajib Pajak pada tanggal 1 Juli 2020 dan tidak menyampaikan pemberitahuan untuk dikenai PPh berdasarkan Ketentuan Umum

UU PPh sehingga pada Tahun Pajak 2020 PT XYZ dikenai PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Pada Tahun Pajak 2020, PT XYZ memperoleh peredaran bruto sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Karena peredaran bruto yang diperoleh PT XYZ tersebut tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak, maka penghasilan PT XYZ dari usaha untuk Tahun Pajak 2021 juga dikenai PPh final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Pada bulan Januari 2021, PT XYZ memberikan jasa perbaikan mobil kepada PT MPN sebesar Rp10.000.000,00 dan PT XYZ dapat menyerahkan fotokopi Surat Keterangan.

PT MPN selaku Pemotong kemudian melakukan konfirmasi atas kebenaran Surat Keterangan dan diketahui bahwa Surat Keterangan tersebut terkonfirmasi sehingga PT MPN tidak melakukan pemotongan PPh final atas transaksi tersebut.

PT MPN memberikan cetakan kode *billing* yang dibubuhi cap atau tulisan "PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR .../PMK.03/2021 dan PT XYZ harus menyampaikan laporan realisasi atas PPh final ditanggung Pemerintah tersebut melalui saluran tertentu paling lambat tanggal 20 Februari 2021 untuk dapat memanfaatkan insentif PPh final ditanggung Pemerintah atas transaksi tersebut.

Dalam hal PT XYZ tidak menyampaikan laporan realisasi atau menyampaikan laporan realisasi Masa Pajak Januari 2021 melewati batas waktu yang ditetapkan maka PT XYZ tidak dapat memanfaatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah untuk Masa Pajak yang bersangkutan dan wajib menyetorkan sendiri PPh final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang menjadi kewajibannya.

H. FORMULIR LAPORAN REALISASI PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH

LAPORAN REALISASI PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH

Status Laporan Realisasi : Normal Pembetulan *)

Wajib Pajak : (1)
 NPWP : (2)
 Masa Pajak : (3)

1. Rekapitulasi Peredaran Bruto atas transaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak

| No. | Lokasi Usaha (4) | NPWP Lokasi Usaha (5) | NPWP Pemotong atau Pemungut (6) | Peredaran Bruto (7) | PPh Final DTP (8) |
|--------|------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| Dst | | | | | |
| Jumlah | | | | | |

2. Rekapitulasi Peredaran Bruto atas transaksi selain dengan Pemotong atau Pemungut Pajak

| No. | Lokasi Usaha (4) | NPWP Lokasi Usaha (5) | Peredaran Bruto (9) | PPh Final DTP (10) |
|--------|------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| Dst | | | | |
| Jumlah | | | | |

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

....., 20.... (11)

(12)

..... (13)

NPWP: (14)

*) pilih salah satu

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR LAPORAN REALISASI
PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan Masa Pajak sesuai periode pelaporan.
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat lokasi usaha.
- Nomor (5) : Diisi dengan NPWP lokasi usaha.
- Nomor (6) : Diisi dengan NPWP Pemotong atau Pemungut Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan jumlah Rupiah Peredaran Bruto dari transaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak dalam Masa Pajak periode pelaporan.
- Nomor (8) : Diisi dengan jumlah Rupiah PPh final ditanggung Pemerintah dalam Masa Pajak periode pelaporan yang tidak dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan oleh Pemotong atau Pemungut Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan jumlah Rupiah seluruh Peredaran Bruto dari transaksi selain dengan Pemotong atau Pemungut Pajak dalam Masa Pajak periode pelaporan.
- Nomor (10) : Diisi dengan jumlah Rupiah PPh final ditanggung Pemerintah dalam Masa Pajak periode pelaporan.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal laporan.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanda tangan dan cap Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama terang Wajib Pajak atau nama Pengurus bagi Wajib Pajak Badan.
- Nomor (14) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak atau NPWP Pengurus bagi Wajib Pajak Badan.

I. FORMULIR LAPORAN REALISASI PPh FINAL JASA KONSTRUKSI
DITANGGUNG PEMERINTAH

LAPORAN REALISASI PPh FINAL JASA KONSTRUKSI
DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

Wajib Pajak Pemotong Pajak : (1)
NPWP : (2)
Masa Pajak : (3)

| | |
|--|-----------------------|
| Jumlah Wajib Pajak Penerima P3-TGAI yang berhak menerima PPh Final Jasa Konstruksi DTP | Wajib Pajak (4) |
| Jumlah Penghasilan Bruto Masa Pajak 2021 (5) | Rp (6) |
| Jumlah PPh Final Jasa Konstruksi DTP Masa Pajak 2021 (7) | Rp (8) |

Daftar Wajib Pajak Penerima P3-TGAI yang telah menerima PPh final jasa konstruksi DTP:

| No. (9) | Nama Wajib Pajak (10) | NPWP (11) | Penghasilan Bruto | PPh Final Jasa Konstruksi DTP |
|------------|--------------------------|--------------|-------------------|-------------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Jumlah | | | (6) | (8) |

Demikian laporan disampaikan.

....., 20 ... (12)

(13)

..... (14)

NPWP: (15)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR LAPORAN REALISASI
PPh FINAL JASA KONSTRUKSI DITANGGUNG PEMERINTAH

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak Pemotong Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Pemotong Pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan Masa Pajak sesuai periode pelaporan.
- Nomor (4) : Diisi dengan jumlah Wajib Pajak Penerima P3-TGAI yang berhak menerima PPh final jasa konstruksi DTP dalam Masa Pajak periode pelaporan.
- Nomor (5) : Diisi dengan Masa Pajak sesuai periode pelaporan.
- Nomor (6) : Diisi dengan jumlah Rupiah Penghasilan Bruto yang diterima Wajib Pajak Penerima P3-TGAI yang berhak menerima PPh final jasa konstruksi DTP dalam Masa Pajak periode pelaporan.
- Nomor (7) : Diisi dengan Masa Pajak sesuai periode pelaporan.
- Nomor (8) : Diisi dengan jumlah Rupiah PPh final jasa konstruksi DTP dalam Masa Pajak periode pelaporan yang diberikan kepada Wajib Pajak Penerima P3-TGAI yang berhak.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak Penerima P3-TGAI yang berhak menerima PPh final jasa konstruksi DTP dalam Masa Pajak periode pelaporan.
- Nomor (11) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Penerima P3-TGAI yang berhak menerima PPh final jasa konstruksi DTP dalam Masa Pajak periode pelaporan.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal laporan.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanda tangan dan cap Wajib Pajak Pemotong Pajak.
- Nomor (14) : Diisi dengan nama Wajib Pajak Pemotong Pajak.
- Nomor (15) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Pemotong Pajak.

J. KODE KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN INSENTIF PEMBEBASAN PPh PASAL 22 IMPOR

| NO. | KODE | NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA |
|-----|-------|--|
| 1 | 41011 | KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL |
| 2 | 41012 | KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN |
| 3 | 41013 | KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI |
| 4 | 41014 | KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN |
| 5 | 41015 | KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN |
| 6 | 41016 | KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN |
| 7 | 41017 | KONSTRUKSI GEDUNG PENGINAPAN |
| 8 | 41018 | KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN |
| 9 | 41019 | KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA |
| 10 | 41020 | PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI GEDUNG |
| 11 | 42111 | KONSTRUKSI JALAN RAYA |
| 12 | 42112 | KONSTRUKSI JEMBATAN DAN JALAN LAYANG |
| 13 | 42113 | KONSTRUKSI LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG |
| 14 | 42114 | KONSTRUKSI JALAN KERETA API DAN JEMBATAN KERETA API |
| 15 | 42115 | KONSTRUKSI TEROWONGAN |
| 16 | 42120 | PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI JALAN DAN REL KERETA API |
| 17 | 42211 | KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN IRIGASI |
| 18 | 42212 | KONSTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN, PENYALURAN DAN PENAMPUNGAN AIR MINUM, AIR LIMBAH DAN DRAINASE |
| 19 | 42213 | KONSTRUKSI BANGUNAN ELEKTRIKAL |
| 20 | 42214 | KONSTRUKSI TELEKOMUNIKASI SARANA BANTU NAVIGASI LAUT DAN RAMBU SUNGAI |
| 21 | 42215 | KONSTRUKSI TELEKOMUNIKASI NAVIGASI UDARA |
| 22 | 42216 | KONSTRUKSI SINYAL DAN TELEKOMUNIKASI KERETA API |
| 23 | 42217 | KONSTRUKSI SENTRAL TELEKOMUNIKASI |
| 24 | 42218 | PEMBUATAN/PENGEBORAN SUMUR AIR TANAH |
| 25 | 42219 | KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN ELEKTRIKAL DAN TELEKOMUNIKASI LAINNYA |
| 26 | 42220 | PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN IRIGASI, KOMUNIKASI DAN LIMBAH |
| 27 | 42911 | KONSTRUKSI BANGUNAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR |
| 28 | 42912 | KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN |
| 29 | 42913 | KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN |
| 30 | 42914 | KONSTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN DAN PENAMPUNGAN BARANG MINYAK DAN GAS |
| 31 | 42915 | PENGERUKAN |
| 32 | 42919 | KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL |
| 33 | 42920 | PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA |
| 34 | 43110 | PEMBONGKARAN |
| 35 | 43120 | PENYIAPAN LAHAN |
| 36 | 43211 | INSTALASI LISTRIK |
| 37 | 43212 | INSTALASI TELEKOMUNIKASI |
| 38 | 43213 | INSTALASI NAVIGASI LAUT DAN SUNGAI |
| 39 | 43214 | INSTALASI NAVIGASI UDARA |
| 40 | 43215 | INSTALASI SINYAL DAN TELEKOMUNIKASI KERETA API |
| 41 | 43216 | INSTALASI SINYAL DAN RAMBU-RAMBU JALAN RAYA |
| 42 | 43217 | INSTALASI ELEKTRONIKA |
| 43 | 43221 | INSTALASI AIR (PIPA) |
| 44 | 43222 | INSTALASI PEMANAS DAN GEOTERMAL |
| 45 | 43223 | INSTALASI MINYAK DAN GAS |
| 46 | 43224 | INSTALASI PENDINGIN DAN VENTILASI UDARA |
| 47 | 43291 | INSTALASI MEKANIKAL |

| NO. | KODE | NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA |
|-----|-------|---|
| 48 | 43299 | INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA YTDL |
| 49 | 43301 | PENGERJAAN PEMASANGAN KACA DAN ALUMUNIUM |
| 50 | 43302 | PENGERJAAN LANTAI, DINDING, PERALATAN SANITER DAN PLAFON |
| 51 | 43303 | PENGECATAN |
| 52 | 43304 | DEKORASI INTERIOR |
| 53 | 43305 | DEKORASI EKSTERIOR |
| 54 | 43309 | PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN LAINNYA |
| 55 | 43901 | PEMASANGAN PONDASI DAN PILAR |
| 56 | 43902 | PEMASANGAN PERANCAH (STEIGER) |
| 57 | 43903 | PEMASANGAN ATAP/ROOF COVERING |
| 58 | 43904 | PEMASANGAN KERANGKA BAJA |
| 59 | 43905 | PENYEWAAN ALAT KONSTRUKSI DENGAN OPERATOR |
| 60 | 43909 | KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA YTDL |
| 61 | 49111 | ANGKUTAN JALAN REL UNTUK PENUMPANG |
| 62 | 49211 | ANGKUTAN BUS ANTARKOTA ANTARPROVINSI (AKAP) |
| 63 | 49212 | ANGKUTAN BUS PERBATASAN |
| 64 | 49213 | ANGKUTAN BUS ANTARKOTA DALAM PROVINSI (AKDP) |
| 65 | 49214 | ANGKUTAN BUS KOTA |
| 66 | 49215 | ANGKUTAN BUS LINTAS BATAS NEGARA |
| 67 | 49221 | ANGKUTAN BUS KHUSUS |
| 68 | 49222 | ANGKUTAN BUS PARIWISATA |
| 69 | 49411 | ANGKUTAN PERBATASAN BUKAN BUS |
| 70 | 49412 | ANGKUTAN ANTARKOTA DALAM PROVINSI (AKDP) BUKAN BUS |
| 71 | 49413 | ANGKUTAN PERKOTAAN |
| 72 | 49414 | ANGKUTAN PERDESAAN |
| 73 | 49421 | ANGKUTAN TAKSI |
| 74 | 49422 | ANGKUTAN SEWA |
| 75 | 49423 | ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG |
| 76 | 49424 | ANGKUTAN OJEK MOTOR |
| 77 | 49425 | ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK WISATA |
| 78 | 49429 | ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK PENUMPANG |
| 79 | 49431 | ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM |
| 80 | 52219 | JASA PENUNJANG ANGKUTAN DARAT LAINNYA |
| 81 | 52292 | JASA EKSPEDISI MUATAN KERETA API DAN EKSPEDISI ANGKUTAN DARAT (EMKA & EAD) |
| 82 | 52299 | JASA PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA YTDL |
| 83 | 56101 | RESTORAN |
| 84 | 56102 | WARUNG MAKAN |
| 85 | 56103 | KEDAI MAKANAN |
| 86 | 56104 | PENYEDIAAN MAKANAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP |
| 87 | 56210 | JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING) |
| 88 | 56290 | PENYEDIAAN MAKANAN LAINNYA |
| 89 | 56301 | BAR |
| 90 | 56303 | RUMAH MINUM/KAFE |
| 91 | 56304 | KEDAI MINUMAN |
| 92 | 56305 | RUMAH/KEDAI OBAT TRADISIONAL |
| 93 | 56306 | PENYEDIAAN MINUMAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP |
| 94 | 85499 | JASA PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA |
| 95 | 85500 | JASA PENUNJANG PENDIDIKAN |
| 96 | 86201 | PRAKTIK DOKTER UMUM |
| 97 | 86202 | PRAKTIK DOKTER SPESIALIS |
| 98 | 86203 | PRAKTIK DOKTER GIGI |
| 99 | 50131 | ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM LINER UNTUK BARANG |
| 100 | 50212 | ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK PENUMPANG DENGAN TRAYEK TIDAK TETAP DAN TIDAK |
| 101 | 50133 | ANGKUTAN LAUT DOMESTIK KHUSUS UNTUK BARANG |

| NO. | KODE | NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA |
|-----|-------|---|
| 102 | 50215 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK PENUMPANG |
| 103 | 50142 | ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM TRAMPER UNTUK BARANG |
| 104 | 50121 | ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM LINER UNTUK PENUMPANG |
| 105 | 50229 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK BARANG TERMASUK PENYEBERANGAN |
| 106 | 50224 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARPROVINSI UNTUK BARANG |
| 107 | 50217 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG |
| 108 | 50221 | ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG UMUM DAN ATAU HEWAN |
| 109 | 50134 | ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PERINTIS UNTUK BARANG |
| 110 | 50122 | ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM TRAMPER UNTUK PENUMPANG |
| 111 | 50223 | ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG BERBAHAYA |
| 112 | 50113 | ANGKUTAN LAUT DOMESTIK KHUSUS UNTUK WISATA |
| 113 | 50135 | ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PELAYARAN RAKYAT |
| 114 | 50214 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARPROVINSI UNTUK PENUMPANG |
| 115 | 50144 | ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL PELAYARAN RAKYAT |
| 116 | 50123 | ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL KHUSUS UNTUK WISATA |
| 117 | 50228 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG |
| 118 | 50143 | ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL KHUSUS UNTUK BARANG |
| 119 | 50219 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK PENUMPANG TERMASUK PENYEBERANGAN |
| 120 | 50227 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG |
| 121 | 50225 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK BARANG |
| 122 | 50226 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG |
| 123 | 50218 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG |
| 124 | 50213 | ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU DENGAN TRAYEK TIDAK TETAP DAN TIDAK TERATUR UNTUK |
| 125 | 50112 | ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM TRAMPER UNTUK PENUMPANG |
| 126 | 50132 | ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM TRAMPER UNTUK BARANG |
| 127 | 50216 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG |
| 128 | 50211 | ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK PENUMPANG DENGAN TRAYEK TETAP DAN TERATUR |
| 129 | 50114 | ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PERINTIS UNTUK PENUMPANG |
| 130 | 50222 | ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG KHUSUS |
| 131 | 50111 | ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM LINER UNTUK PENUMPANG |
| 132 | 50141 | ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM LINER UNTUK BARANG |

K. FORMULIR PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS
PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 IMPOR

Nomor :(1)
Lampiran :(2)
Perihal : Permohonan Surat Keterangan Bebas
Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor

Kepada Yth.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....(3)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(4)
NPWP :(5)
Jabatan :(6)

Bertindak selaku *) : Wajib Pajak
 Pengurus dari Wajib Pajak

Nama :(7)
NPWP :(8)
Kode KLU :(9)
Alamat :(10)

mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomortentang..., dengan alasan:

termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pembebasan PPh Pasal 22 Impor Peraturan Menteri Keuangan Nomortentang.....

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

....., 20.... (11)

Pemohon,

..... (12)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PERMOHONAN SURAT KETERANGAN
BEBAS PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 IMPOR

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran.
- Nomor (3) : Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
- Nomor (5) : Diisi dengan NPWP pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
- Nomor (6) : Diisi dengan jabatan pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan kode KLU Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal permohonan.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama terang pemohon.

L. FORMULIR SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 IMPOR



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

SURAT KETERANGAN BEBAS

PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR

NOMOR :(2)

TANGGAL :(3)

Kepala Kantor Pelayanan Pajak.....(1)
menerangkan bahwa orang pribadi/badan *) tersebut di bawah ini:

Nama Wajib Pajak :
.....(4)

NPWP :
.....(5)

Kode KLU :
.....(6)

Alamat :
.....(7)

dibebaskan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomortentang....., dengan alasan:

termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pembebasan PPh Pasal 22 Impor Peraturan Menteri Keuangan Nomortentang.....

Surat Keterangan Bebas ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal 2021.



Kode verifikasi:

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR SURAT KETERANGAN BEBAS
PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 IMPOR

- Nomor (1) : Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak penerbit Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor
- Nomor (3) : Diisi tanggal penerbitan Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Nomor (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak
- Nomor (6) : Diisi dengan kode KLU Wajib Pajak
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak

M. FORMULIR PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS
PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 IMPOR



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

Nomor :(2)

Perihal : Penolakan Permohonan Surat Keterangan
Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor

Kepada Yth.

.....

..... (3)

Berkenaan dengan permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor yang Saudara ajukan Nomor(4) tanggal(5) dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomortentang..., permohonan Saudara tidak disetujui dengan alasan:

tidak termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pembebasan PPh Pasal 22 Impor Peraturan Menteri Keuangan Nomortentang.....

Demikian kami sampaikan.



Kode verifikasi:

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN
SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 IMPOR

- Nomor (1) : Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan Surat Keterangan Bebas
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan

N. FORMULIR LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PPh PASAL 22 IMPOR

LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
IMPOR

Nama Wajib Pajak : (1)

NPWP : (2)

Kode KLU : (3)

Masa Pajak : (4)

Daftar rincian impor yang mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 impor

| No. (5) | Nomor PIB *) (6) | Tanggal PIB (7) | Nilai Impor **) (8) | PPh 22 Impor (9) |
|------------|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | Jumlah (8) | | | |

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

....., 20.... (10)

(11)

..... (12)

NPWP..... (13)

*) : Nomor PIB atau dokumen yang dipersamakan dengan dokumen pabean impor.

***) : Nilai impor adalah *Cost Insurance, and Freight* (CIF) ditambah Bea Masuk dan pungutan lainnya berdasarkan ketentuan di bidang kepabeanan (contoh: dokumen BC 2.0, BC 2.5, BC 2.8, dan lain sebagainya).

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR LAPORAN REALISASI
PEMBEBASAN PPh PASAL 22 IMPOR

- Nomor (1) : Diisi dengan Wajib Pajak yang mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 impor dalam periode pelaporan.
- Nomor (2) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 impor dalam periode pelaporan.
- Nomor (3) : Diisi dengan kode KLU Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan sesuai periode pelaporan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Pengajuan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atau dokumen yang dipersamakan dengan dokumen pabean impor.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atau dokumen yang dipersamakan dengan dokumen pabean impor.
- Nomor (8) : Diisi dengan nilai impor yang dibebaskan dalam setiap periode pelaporan.
- Nomor (9) : Diisi dengan nilai PPh Pasal 22 impor yang dibebaskan dalam setiap periode pelaporan.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal laporan.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanda tangan dan cap Wajib Pajak yang membuat laporan.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama terang Wajib Pajak yang membuat laporan.
- Nomor (13) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang membuat laporan.

O. KODE KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN INSENTIF PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25

| NO. | KODE | NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA |
|-----|-------|--|
| 1 | 41011 | KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL |
| 2 | 41012 | KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN |
| 3 | 41013 | KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI |
| 4 | 41014 | KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN |
| 5 | 41015 | KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN |
| 6 | 41016 | KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN |
| 7 | 41017 | KONSTRUKSI GEDUNG PENGINAPAN |
| 8 | 41018 | KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN |
| 9 | 41019 | KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA |
| 10 | 41020 | PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI GEDUNG |
| 11 | 42111 | KONSTRUKSI JALAN RAYA |
| 12 | 42112 | KONSTRUKSI JEMBATAN DAN JALAN LAYANG |
| 13 | 42113 | KONSTRUKSI LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG |
| 14 | 42114 | KONSTRUKSI JALAN KERETA API DAN JEMBATAN KERETA API |
| 15 | 42115 | KONSTRUKSI TEROWONGAN |
| 16 | 42120 | PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI JALAN DAN REL KERETA API |
| 17 | 42211 | KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN IRIGASI |
| 18 | 42212 | KONSTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN, PENYALURAN DAN PENAMPUNGAN AIR MINUM, AIR LIMBAH DAN DRAINASE |
| 19 | 42213 | KONSTRUKSI BANGUNAN ELEKTRIKAL |
| 20 | 42214 | KONSTRUKSI TELEKOMUNIKASI SARANA BANTU NAVIGASI LAUT DAN RAMBU SUNGAI |
| 21 | 42215 | KONSTRUKSI TELEKOMUNIKASI NAVIGASI UDARA |
| 22 | 42216 | KONSTRUKSI SINYAL DAN TELEKOMUNIKASI KERETA API |
| 23 | 42217 | KONSTRUKSI SENTRAL TELEKOMUNIKASI |
| 24 | 42218 | PEMBUATAN/PENGEBORAN SUMUR AIR TANAH |
| 25 | 42219 | KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN ELEKTRIKAL DAN TELEKOMUNIKASI LAINNYA |
| 26 | 42220 | PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN IRIGASI, KOMUNIKASI DAN LIMBAH |
| 27 | 42911 | KONSTRUKSI BANGUNAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR |
| 28 | 42912 | KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN |
| 29 | 42913 | KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN |
| 30 | 42914 | KONSTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN DAN PENAMPUNGAN BARANG MINYAK DAN GAS |
| 31 | 42915 | PENGERUKAN |
| 32 | 42919 | KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL |
| 33 | 42920 | PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA |
| 34 | 43110 | PEMBONGKARAN |
| 35 | 43120 | PENYIAPAN LAHAN |
| 36 | 43211 | INSTALASI LISTRIK |
| 37 | 43212 | INSTALASI TELEKOMUNIKASI |
| 38 | 43213 | INSTALASI NAVIGASI LAUT DAN SUNGAI |
| 39 | 43214 | INSTALASI NAVIGASI UDARA |
| 40 | 43215 | INSTALASI SINYAL DAN TELEKOMUNIKASI KERETA API |
| 41 | 43216 | INSTALASI SINYAL DAN RAMBU-RAMBU JALAN RAYA |
| 42 | 43217 | INSTALASI ELEKTRONIKA |
| 43 | 43221 | INSTALASI AIR (PIPA) |
| 44 | 43222 | INSTALASI PEMANAS DAN GEOTERMAL |
| 45 | 43223 | INSTALASI MINYAK DAN GAS |
| 46 | 43224 | INSTALASI PENDINGIN DAN VENTILASI UDARA |

| NO. | KODE | NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA |
|-----|-------|--|
| 47 | 43291 | INSTALASI MEKANIKAL |
| 48 | 43299 | INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA YTDL |
| 49 | 43301 | PENGERJAAN PEMASANGAN KACA DAN ALUMUNUM |
| 50 | 43302 | PENGERJAAN LANTAI, DINDING, PERALATAN SANITER DAN PLAFON |
| 51 | 43303 | PENGECATAN |
| 52 | 43304 | DEKORASI INTERIOR |
| 53 | 43305 | DEKORASI EKSTERIOR |
| 54 | 43309 | PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN LAINNYA |
| 55 | 43901 | PEMASANGAN PONDASI DAN PILAR |
| 56 | 43902 | PEMASANGAN PERANCAH (STEIGER) |
| 57 | 43903 | PEMASANGAN ATAP/ROOF COVERING |
| 58 | 43904 | PEMASANGAN KERANGKA BAJA |
| 59 | 43905 | PENYEWAAN ALAT KONSTRUKSI DENGAN OPERATOR |
| 60 | 43909 | KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA YTDL |
| 61 | 49111 | ANGKUTAN JALAN REL UNTUK PENUMPANG |
| 62 | 49112 | ANGKUTAN JALAN REL KHUSUS WISATA |
| 63 | 49121 | ANGKUTAN JALAN REL UNTUK BARANG |
| 64 | 49129 | ANGKUTAN JALAN REL KHUSUS LAINNYA |
| 65 | 49211 | ANGKUTAN BUS ANTARKOTA ANTARPROVINSI (AKAP) |
| 66 | 49212 | ANGKUTAN BUS PERBATASAN |
| 67 | 49213 | ANGKUTAN BUS ANTARKOTA DALAM PROVINSI (AKDP) |
| 68 | 49214 | ANGKUTAN BUS KOTA |
| 69 | 49215 | ANGKUTAN BUS LINTAS BATAS NEGARA |
| 70 | 49221 | ANGKUTAN BUS KHUSUS |
| 71 | 49222 | ANGKUTAN BUS PARIWISATA |
| 72 | 49300 | ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA |
| 73 | 49411 | ANGKUTAN PERBATASAN BUKAN BUS |
| 74 | 49412 | ANGKUTAN ANTARKOTA DALAM PROVINSI (AKDP) BUKAN BUS |
| 75 | 49413 | ANGKUTAN PERKOTAAN |
| 76 | 49414 | ANGKUTAN PERDESAAN |
| 77 | 49421 | ANGKUTAN TAKSI |
| 78 | 49422 | ANGKUTAN SEWA |
| 79 | 49423 | ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG |
| 80 | 49424 | ANGKUTAN OJEK MOTOR |
| 81 | 49425 | ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK WISATA |
| 82 | 49429 | ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK PENUMPANG |
| 83 | 49431 | ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM |
| 84 | 49432 | ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG KHUSUS |
| 85 | 49433 | ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM |
| 86 | 51101 | ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DOMESTIK UMUM UNTUK PENUMPANG |
| 87 | 51102 | ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DOMESTIK PERINTIS UNTUK PENUMPANG |
| 88 | 51103 | ANGKUTAN UDARA BERJADWAL INTERNASIONAL UNTUK PENUMPANG |
| 89 | 51104 | ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL DOMESTIK UMUM UNTUK PENUMPANG |
| 90 | 51105 | ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL DOMESTIK PERINTIS UNTUK PENUMPANG |
| 91 | 51106 | ANGKUTAN UDARA KHUSUS OLAHRAGA |
| 92 | 51107 | ANGKUTAN UDARA KHUSUS UNTUK WISATA |
| 93 | 51109 | ANGKUTAN UDARA KHUSUS LAINNYA |
| 94 | 51201 | ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DOMESTIK UMUM UNTUK BARANG |
| 95 | 51202 | ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DOMESTIK PERINTIS UNTUK BARANG |
| 96 | 51203 | ANGKUTAN UDARA BERJADWAL INTERNASIONAL UNTUK BARANG |
| 97 | 51204 | ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL DOMESTIK UMUM UNTUK BARANG |
| 98 | 51205 | ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL DOMESTIK PERINTIS UNTUK BARANG |
| 99 | 52101 | PERGUDANGAN |

| NO. | KODE | NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA |
|-----|-------|--|
| 100 | 52102 | JASA COLD STORAGE |
| 101 | 52103 | JASA BOUNDED WAREHOUSING ATAU WILAYAH KAWASAN BERIKAT |
| 102 | 52109 | JASA PERGUDANGAN LAINNYA |
| 103 | 52211 | JASA TERMINAL DARAT |
| 104 | 52213 | JASA JALAN TOL |
| 105 | 52219 | JASA PENUNJANG ANGKUTAN DARAT LAINNYA |
| 106 | 52221 | JASA PELAYANAN KEPELABUHANAN LAUT |
| 107 | 52222 | JASA PELAYANAN KEPELABUHANAN SUNGAI DAN DANAU |
| 108 | 52223 | JASA PELAYANAN KEPELABUHANAN PENYEBERANGAN |
| 109 | 52229 | JASA PENUNJANG ANGKUTAN AIR LAINNYA |
| 110 | 52230 | JASA KEBANDARUDARAAN |
| 111 | 52240 | PENANGANAN KARGO (BONGKAR MUAT BARANG) |
| 112 | 52291 | JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (JPT) |
| 113 | 52292 | JASA EKSPEDISI MUATAN KERETA API DAN EKSPEDISI ANGKUTAN DARAT (EMKA & EAD) |
| 114 | 52299 | JASA PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA YTDL |
| 115 | 53200 | KURIR |
| 116 | 55111 | HOTEL BINTANG LIMA |
| 117 | 55112 | HOTEL BINTANG EMPAT |
| 118 | 55113 | HOTEL BINTANG TIGA |
| 119 | 55114 | HOTEL BINTANG DUA |
| 120 | 55115 | HOTEL BINTANG SATU |
| 121 | 55120 | HOTEL MELATI |
| 122 | 55130 | PONDOK WISATA (HOME STAY) |
| 123 | 55191 | PENGINAPAN REMAJA (YOUTH HOSTEL) |
| 124 | 55192 | BUMI PERKEMAHAN |
| 125 | 55193 | PERSINGGAHAN KARAVAN |
| 126 | 55194 | VILA |
| 127 | 55195 | APARTEMEN HOTEL |
| 128 | 55199 | PENYEDIAAN AKOMODASI JANGKA PENDEK LAINNYA |
| 129 | 55900 | PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA |
| 130 | 56101 | RESTORAN |
| 131 | 56102 | WARUNG MAKAN |
| 132 | 56103 | KEDAI MAKANAN |
| 133 | 56104 | PENYEDIAAN MAKANAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP |
| 134 | 56210 | JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING) |
| 135 | 56290 | PENYEDIAAN MAKANAN LAINNYA |
| 136 | 56301 | BAR |
| 137 | 56302 | KELAB MALAM ATAU DISKOTIK YANG UTAMANYA MENYEDIKAN MINUMAN |
| 138 | 56303 | RUMAH MINUM/KAFE |
| 139 | 56304 | KEDAI MINUMAN |
| 140 | 56305 | RUMAH/KEDAI OBAT TRADISIONAL |
| 141 | 56306 | PENYEDIAAN MINUMAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP |
| 142 | 85111 | JASA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH PEMERINTAH |
| 143 | 85112 | JASA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH PEMERINTAH |
| 144 | 85121 | JASA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA |
| 145 | 85122 | JASA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA |
| 146 | 85210 | JASA PENDIDIKAN MENENGAH UMUM/MADRASAH ALIYAH PEMERINTAH |
| 147 | 85220 | JASA PENDIDIKAN MENENGAH UMUM/MADRASAH ALIYAH SWASTA |
| 148 | 85230 | JASA PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DAN TEKNIK/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN PEMERINTAH |
| 149 | 85240 | JASA PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DAN TEKNIK/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN SWASTA |
| 150 | 85311 | JASA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM GELAR PEMERINTAH |

| NO. | KODE | NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA |
|-----|-------|---|
| 151 | 85312 | JASA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM NON GELAR PEMERINTAH |
| 152 | 85321 | JASA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM GELAR SWASTA |
| 153 | 85322 | JASA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM NON GELAR SWASTA |
| 154 | 85410 | JASA PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN REKREASI |
| 155 | 85420 | JASA PENDIDIKAN KEBUDAYAAN |
| 156 | 85430 | JASA PENDIDIKAN LAINNYA PEMERINTAH |
| 157 | 85491 | JASA PENDIDIKAN MANAJEMEN DAN PERBANKAN |
| 158 | 85492 | JASA PENDIDIKAN KOMPUTER (TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI) SWASTA |
| 159 | 85493 | JASA PENDIDIKAN BAHASA SWASTA |
| 160 | 85494 | JASA PENDIDIKAN KESEHATAN SWASTA |
| 161 | 85495 | JASA PENDIDIKAN BIMBINGAN BELAJAR DAN KONSELING SWASTA |
| 162 | 85496 | JASA PENDIDIKAN AWAK PESAWAT DAN JASA ANGKUTAN UDARA KHUSUS PENDIDIKAN AWAK PESAWAT |
| 163 | 85497 | JASA PENDIDIKAN TEKNIK SWASTA |
| 164 | 85498 | JASA PENDIDIKAN KERAJINAN DAN INDUSTRI |
| 165 | 85499 | JASA PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA |
| 166 | 85500 | JASA PENUNJANG PENDIDIKAN |
| 167 | 85601 | JASA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK PEMERINTAH |
| 168 | 85602 | JASA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL |
| 169 | 85603 | JASA PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN SWASTA |
| 170 | 85604 | JASA PENDIDIKAN TAMAN PENITIPAN ANAK |
| 171 | 86101 | JASA RUMAH SAKIT PEMERINTAH |
| 172 | 86102 | JASA PUSKESMAS |
| 173 | 86103 | JASA RUMAH SAKIT SWASTA |
| 174 | 86104 | JASA POLIKLINIK SWASTA |
| 175 | 86109 | JASA RUMAH SAKIT LAINNYA |
| 176 | 86201 | PRAKTIK DOKTER UMUM |
| 177 | 86202 | PRAKTIK DOKTER SPESIALIS |
| 178 | 86203 | PRAKTIK DOKTER GIGI |
| 179 | 86901 | JASA PELAYANAN KESEHATAN YANG DILAKUKAN OLEH PARAMEDIS |
| 180 | 86902 | JASA PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL |
| 181 | 86903 | JASA PELAYANAN PENUNJANG KESEHATAN |
| 182 | 86904 | JASA ANGKUTAN KHUSUS PENGANGKUTAN ORANG SAKIT (MEDICAL EVACUATION) |
| 183 | 50131 | ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM LINER UNTUK BARANG |
| 184 | 50212 | ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK PENUMPANG DENGAN TRAYEK TIDAK TETAP DAN TIDAK |
| 185 | 50133 | ANGKUTAN LAUT DOMESTIK KHUSUS UNTUK BARANG |
| 186 | 50215 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK PENUMPANG |
| 187 | 50142 | ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM TRAMPER UNTUK BARANG |
| 188 | 50121 | ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM LINER UNTUK PENUMPANG |
| 189 | 50229 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK BARANG TERMASUK PENYEBERANGAN |
| 190 | 50224 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARPROVINSI UNTUK BARANG |
| 191 | 50217 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG |
| 192 | 50221 | ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG UMUM DAN ATAU HEWAN |
| 193 | 50134 | ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PERINTIS UNTUK BARANG |
| 194 | 50122 | ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM TRAMPER UNTUK PENUMPANG |
| 195 | 50223 | ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG BERBAHAYA |
| 196 | 50113 | ANGKUTAN LAUT DOMESTIK KHUSUS UNTUK WISATA |
| 197 | 50135 | ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PELAYARAN RAKYAT |
| 198 | 50214 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARPROVINSI UNTUK PENUMPANG |
| 199 | 50144 | ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL PELAYARAN RAKYAT |

| NO. | KODE | NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA |
|-----|-------|---|
| 200 | 50123 | ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL KHUSUS UNTUK WISATA |
| 201 | 50228 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG |
| 202 | 50143 | ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL KHUSUS UNTUK BARANG |
| 203 | 50219 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK PENUMPANG TERMASUK PENYEBERANGAN |
| 204 | 50227 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG |
| 205 | 50225 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK BARANG |
| 206 | 50226 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG |
| 207 | 50218 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG |
| 208 | 50213 | ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU DENGAN TRAYEK TIDAK TETAP DAN TIDAK TERATUR UNTUK |
| 209 | 50112 | ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM TRAMPER UNTUK PENUMPANG |
| 210 | 50132 | ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM TRAMPER UNTUK BARANG |
| 211 | 50216 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG |
| 212 | 50211 | ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK PENUMPANG DENGAN TRAYEK TETAP DAN TERATUR |
| 213 | 50114 | ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PERINTIS UNTUK PENUMPANG |
| 214 | 50222 | ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG KHUSUS |
| 215 | 50111 | ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM LINER UNTUK PENUMPANG |
| 216 | 50141 | ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM LINER UNTUK BARANG |

P. CONTOH PENGHITUNGAN PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25

1. Contoh penghitungan angsuran PPh Pasal 25 dengan dasar penghitungan SPT Tahunan

- a. Bagi Wajib Pajak yang memanfaatkan insentif pengurangan PPh Pasal 25 sebagaimana diatur dalam PMK-86/PMK.03/2020 s.t.d.d PMK-110/PMK.03/2020 dan PMK-9/PMK.03/2021.

PT A memanfaatkan insentif pengurangan PPh Pasal 25 sebagaimana diatur dalam PMK-86/PMK.03/2020 s.t.d.d PMK-110/PMK.03/2020. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar sendiri oleh PT A untuk Masa Pajak Desember 2020 adalah sebesar Rp50.000.000,00 (hasil pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 50%). PT A menyampaikan surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam PMK-9/PMK.03/2021 pada tanggal 3 Februari 2021 dan dinyatakan berhak. PT A menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2020 pada 27 April 2021. Dengan demikian, besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar sendiri oleh PT A untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Masa Pajak Maret 2021 adalah sebesar Rp.50.000.000,00 (hasil pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 50%).

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk Tahun Pajak 2021 sesuai dengan penghitungan dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun pajak 2020 adalah sebesar Rp40.000.000,-. Dikarenakan pemanfaatan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam PMK-9/PMK.03/2021, maka besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri oleh PT A mulai Masa Pajak April 2021 sampai dengan Masa Pajak Juni 2021 menjadi sebesar Rp.20.000.000,- (hasil pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 50%). Wajib Pajak menyampaikan kewajiban penyampaian laporan realisasi pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan tepat waktu.

Pada tanggal 31 Juli 2021 PT A menyampaikan kembali surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal

25 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan ini karena memenuhi Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini dan dinyatakan berhak. Oleh karena itu besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri mulai Masa Pajak Juli 2021 sampai dengan Masa Pajak Desember 2021 menjadi sebesar Rp.20.000.000,- (hasil pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 50%).

Berdasarkan data di atas, penghitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar untuk Tahun Pajak 2021 setiap bulan adalah sebagai berikut:

| | |
|---|--------------------|
| PPh Terutang SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2020 | Rp1.125.000.000,00 |
| Dikurangi Kredit Pajak | Rp645.000.000,00 |
| PPh yang masih harus dibayar (PPh Pasal 29) | Rp480.000.000,00 |
| Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk Tahun Pajak 2021 | Rp40.000.000,00 |

| Rincian Angsuran PPh Pasal 25 | |
|---|-----------------|
| Masa Pajak Januari 2021 s.d. Maret 2021 (besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Desember 2020 dikurangi 50%) | Rp50.000.000,00 |
| Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April 2021 s.d. Juni 2021 (yang seharusnya terutang) | Rp40.000.000,00 |
| Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April 2021 s.d. Juni 2021 (40.000.000 x 50%) | Rp20.000.000,00 |
| Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April 2021 s.d. Juni 2021 | Rp20.000.000,00 |
| Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juli 2021 s.d. Desember 2021 (yang seharusnya terutang) | Rp40.000.000,00 |

| | |
|--|-----------------|
| Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juli 2021 s.d. Desember 2021 (40.000.000 x 50%) | Rp20.000.000,00 |
| Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juli 2021 s.d. Desember 2021 | Rp20.000.000,00 |

- b. Bagi Wajib Pajak yang tidak memanfaatkan insentif pengurangan PPh Pasal 25 sebagaimana diatur dalam PMK-86/PMK.03/2020 s.t.d.d PMK-110/PMK.03/2020 dan PMK-9/PMK.03/2021.

PT B tidak memanfaatkan insentif pengurangan PPh Pasal 25 sebagaimana diatur dalam PMK-86/PMK.03/2020 s.t.d.d PMK-110/PMK.03/2020 dan PMK-9/PMK.03/2021. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar sendiri oleh PT B untuk Masa Pajak Desember 2020 adalah sebesar Rp50.000.000,00. PT B menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2020 pada 27 April 2021. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar sendiri oleh PT B untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Masa Pajak Maret 2021 adalah sebesar Rp.50.000.000,00 (menggunakan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Desember 2020).

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk Tahun Pajak 2021 sesuai dengan penghitungan dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun pajak 2020 adalah sebesar Rp40.000.000,-. Dikarenakan tidak memanfaatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam PMK-9/PMK.03/2021, maka besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri oleh PT B mulai Masa Pajak April 2021 sampai dengan Masa Pajak Juni 2021 tetap sebesar Rp.40.000.000,-.

Pada tanggal 31 Juli 2021 PT B menyampaikan kembali surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan ini karena memenuhi Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini dan dinyatakan berhak. Oleh karena itu besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri mulai Masa

Pajak Juli 2021 sampai dengan Masa Pajak Desember 2021 menjadi sebesar Rp.20.000.000,- (hasil pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 50%).

Berdasarkan data di atas, penghitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar untuk Tahun Pajak 2021 setiap bulan adalah sebagai berikut:

| | |
|---|--------------------|
| PPh Terutang SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2020 | Rp1.125.000.000,00 |
| Dikurangi Kredit Pajak | Rp645.000.000,00 |
| PPh yang masih harus dibayar (PPh Pasal 29) | Rp480.000.000,00 |
| Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk Tahun Pajak 2021 | Rp40.000.000,00 |

| Rincian Angsuran PPh Pasal 25 | |
|--|-----------------|
| Angsuran Masa Pajak Januari 2021 s.d. Maret 2021 (menggunakan angsuran Masa Pajak Desember 2020) | Rp50.000.000,00 |
| Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April 2021 s.d. Juni 2021 | Rp40.000.000,00 |
| Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juli 2021 s.d. Desember 2021 (yang seharusnya terutang) | Rp40.000.000,00 |
| Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juli 2021 s.d. Desember 2021 (40.000.000 x 50%) | Rp20.000.000,00 |
| Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juli 2021 s.d. Desember 2021 | Rp20.000.000,00 |

2. Contoh penghitungan angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban laporan berkala (Wajib Pajak masuk bursa)

Pada Tahun Pajak 2021, PT C memenuhi persyaratan untuk memperoleh fasilitas penurunan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2b) Undang-Undang PPh. Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak

Januari 2021 sampai dengan Masa Pajak Maret 2021 sebesar Rp150.000.000,00. Informasi akumulasi Laba/(Rugi) dan Kredit Pajak Berdasarkan Laporan Keuangan Triwulan tahun 2021 sebagai berikut:

| Laporan Triwulan | Januari – Maret | April – Juni | Juli-September |
|-------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| Penghasilan Neto | Rp2.100.000.000,00 | Rp4.700.000.000,00 | Rp9.800.000.000,00 |
| PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 | Rp75.000.000,00 | Rp125.000.000,00 | Rp200.000.000,00 |

PT C menyampaikan surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 PMK-9/PMK.03/2021 pada tanggal 3 Februari 2021 dan dinyatakan berhak. Wajib Pajak menyampaikan kewajiban penyampailan laporan realisasi pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan tepat waktu. Pada tanggal 31 Juli 2021 PT C menyampaikan kembali surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan ini karena memenuhi Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini dan dinyatakan berhak.

Berdasarkan data di atas, penghitungan angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar untuk 3 (tiga) Masa Pajak selanjutnya adalah sebagai berikut:

| Masa Pajak | April - Juni | Juli - September | Oktober - Desember |
|--|--|---|--|
| Periode yang dilaporkan | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III |
| Penghasilan Neto | Rp2.100.000.000,00 | Rp4.700.000.000,00 | Rp9.800.000.000,00 |
| PPh Terutang | Rp399.000.000,00 | Rp893.000.000,00 | Rp1.862.000.000,00 |
| Dikurangi: | | | |
| - PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak periode yang dilaporkan | Rp75.000.000,00 | Rp125.000.000,00 | Rp200.000.000,00 |
| - Angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya dibayar sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak sebelum Masa Pajak periode yang dilaporkan | Rp150.000.000,00 | Rp324.000.000,00 | Rp768.000.000,00 |
| Angsuran yang masih harus dibayar (dalam 3 bulan) | Rp174.000.000,00 | Rp444.000.000,00 | Rp894.000.000,00 |
| Angsuran yang seharusnya dibayar per bulan | Rp58.000.000,00 | Rp148.000.000,00 | Rp298.000.000,00 |
| Pengurang angsuran PPh Pasal 25 | Rp29.000.000,00 (Rp58.000.000,00 x 50%) | Rp74.000.000,00 (Rp148.000.000,00 x 50%) | Rp149.000.000,00 (Rp298.000.000,00 x 50%) |
| Angsuran setelah pengurangan PPh Pasal 25 | Rp29.000.000,00 | Rp74.000.000,00 | Rp149.000.000,00 |

Q. FORMULIR REALISASI PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25

LAPORAN REALISASI PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

Wajib Pajak : (1)
NPWP : (2)
Masa Pajak : (3)

Rincian pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25:

| No. (4) | Masa Pajak 2021 (3) | |
|------------|---------------------------|--------------------------------|
| | PPh Terutang (Rp) (5) | Pengurang Angsuran (Rp) (6) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

....., 20.... (7)

(8)

..... (9)

NPWP: (10)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR LAPORAN REALISASI
PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mendapatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25.
- Nomor (2) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mendapatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25.
- Nomor (3) : Diisi dengan periode pelaporan (Masa Pajak).
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (5) : Diisi dengan jumlah rupiah PPh Pasal 25 Terutang.
- Nomor (6) : Diisi dengan jumlah rupiah besarnya pengurangan angsuran PPh Pasal 25.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal laporan.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanda tangan dan cap Wajib Pajak yang membuat laporan.
- Nomor (9) : Diisi dengan nama Wajib Pajak atau pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
- Nomor (10) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak atau pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan) yang membuat laporan.

R. KODE KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN INSENTIF PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PPN

| NO. | KODE | NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA |
|-----|-------|--|
| 1 | 41011 | KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL |
| 2 | 41012 | KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN |
| 3 | 41013 | KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI |
| 4 | 41014 | KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN |
| 5 | 41015 | KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN |
| 6 | 41016 | KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN |
| 7 | 41017 | KONSTRUKSI GEDUNG PENGINAPAN |
| 8 | 41018 | KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN |
| 9 | 41019 | KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA |
| 10 | 41020 | PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI GEDUNG |
| 11 | 42111 | KONSTRUKSI JALAN RAYA |
| 12 | 42112 | KONSTRUKSI JEMBATAN DAN JALAN LAYANG |
| 13 | 42113 | KONSTRUKSI LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG |
| 14 | 42114 | KONSTRUKSI JALAN KERETA API DAN JEMBATAN KERETA API |
| 15 | 42115 | KONSTRUKSI TEROWONGAN |
| 16 | 42120 | PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI JALAN DAN REL KERETA API |
| 17 | 42211 | KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN IRIGASI |
| 18 | 42212 | KONSTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN, PENYALURAN DAN PENAMPUNGAN AIR MINUM, AIR LIMBAH DAN DRAINASE |
| 19 | 42213 | KONSTRUKSI BANGUNAN ELEKTRIKAL |
| 20 | 42214 | KONSTRUKSI TELEKOMUNIKASI SARANA BANTU NAVIGASI LAUT DAN RAMBU SUNGAI |
| 21 | 42215 | KONSTRUKSI TELEKOMUNIKASI NAVIGASI UDARA |
| 22 | 42216 | KONSTRUKSI SINYAL DAN TELEKOMUNIKASI KERETA API |
| 23 | 42217 | KONSTRUKSI SENTRAL TELEKOMUNIKASI |
| 24 | 42218 | PEMBUATAN/PENGEBORAN SUMUR AIR TANAH |
| 25 | 42219 | KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN ELEKTRIKAL DAN TELEKOMUNIKASI LAINNYA |
| 26 | 42220 | PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN IRIGASI, KOMUNIKASI DAN LIMBAH |
| 27 | 42911 | KONSTRUKSI BANGUNAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR |
| 28 | 42912 | KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN |
| 29 | 42913 | KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN |
| 30 | 42914 | KONSTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN DAN PENAMPUNGAN BARANG MINYAK DAN GAS |
| 31 | 42915 | PENGERUKAN |
| 32 | 42919 | KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL |
| 33 | 42920 | PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA |
| 34 | 43110 | PEMBONGKARAN |
| 35 | 43120 | PENYIAPAN LAHAN |
| 36 | 43211 | INSTALASI LISTRIK |
| 37 | 43212 | INSTALASI TELEKOMUNIKASI |
| 38 | 43213 | INSTALASI NAVIGASI LAUT DAN SUNGAI |
| 39 | 43214 | INSTALASI NAVIGASI UDARA |
| 40 | 43215 | INSTALASI SINYAL DAN TELEKOMUNIKASI KERETA API |
| 41 | 43216 | INSTALASI SINYAL DAN RAMBU-RAMBU JALAN RAYA |
| 42 | 43217 | INSTALASI ELEKTRONIKA |
| 43 | 43221 | INSTALASI AIR (PIPA) |
| 44 | 43222 | INSTALASI PEMANAS DAN GEOTERMAL |
| 45 | 43223 | INSTALASI MINYAK DAN GAS |
| 46 | 43224 | INSTALASI PENDINGIN DAN VENTILASI UDARA |

| NO. | KODE | NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA |
|-----|-------|---|
| 47 | 43291 | INSTALASI MEKANIKAL |
| 48 | 43299 | INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA YTDL |
| 49 | 43301 | PENGERJAAN PEMASANGAN KACA DAN ALUMUNIUM |
| 50 | 43302 | PENGERJAAN LANTAI, DINDING, PERALATAN SANITER DAN PLAFON |
| 51 | 43303 | PENGECATAN |
| 52 | 43304 | DEKORASI INTERIOR |
| 53 | 43305 | DEKORASI EKSTERIOR |
| 54 | 43309 | PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN LAINNYA |
| 55 | 43901 | PEMASANGAN PONDASI DAN PILAR |
| 56 | 43902 | PEMASANGAN PERANCAH (STEIGER) |
| 57 | 43903 | PEMASANGAN ATAP/ROOF COVERING |
| 58 | 43904 | PEMASANGAN KERANGKA BAJA |
| 59 | 43905 | PENYEWAAN ALAT KONSTRUKSI DENGAN OPERATOR |
| 60 | 43909 | KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA YTDL |
| 61 | 49111 | ANGKUTAN JALAN REL UNTUK PENUMPANG |
| 62 | 49211 | ANGKUTAN BUS ANTARKOTA ANTARPROVINSI (AKAP) |
| 63 | 49212 | ANGKUTAN BUS PERBATASAN |
| 64 | 49213 | ANGKUTAN BUS ANTARKOTA DALAM PROVINSI (AKDP) |
| 65 | 49214 | ANGKUTAN BUS KOTA |
| 66 | 49215 | ANGKUTAN BUS LINTAS BATAS NEGARA |
| 67 | 49221 | ANGKUTAN BUS KHUSUS |
| 68 | 49222 | ANGKUTAN BUS PARIWISATA |
| 69 | 49411 | ANGKUTAN PERBATASAN BUKAN BUS |
| 70 | 49412 | ANGKUTAN ANTARKOTA DALAM PROVINSI (AKDP) BUKAN BUS |
| 71 | 49413 | ANGKUTAN PERKOTAAN |
| 72 | 49414 | ANGKUTAN PERDESAAN |
| 73 | 49421 | ANGKUTAN TAKSI |
| 74 | 49422 | ANGKUTAN SEWA |
| 75 | 49423 | ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG |
| 76 | 49424 | ANGKUTAN OJEK MOTOR |
| 77 | 49425 | ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK WISATA |
| 78 | 49429 | ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK PENUMPANG |
| 79 | 49431 | ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM |
| 80 | 52219 | JASA PENUNJANG ANGKUTAN DARAT LAINNYA |
| 81 | 52292 | JASA EKSPEDISI MUATAN KERETA API DAN EKSPEDISI ANGKUTAN DARAT (EMKA & EAD) |
| 82 | 52299 | JASA PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA YTDL |
| 83 | 56101 | RESTORAN |
| 84 | 56102 | WARUNG MAKAN |
| 85 | 56103 | KEDAI MAKANAN |
| 86 | 56104 | PENYEDIAAN MAKANAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP |
| 87 | 56210 | JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING) |
| 88 | 56290 | PENYEDIAAN MAKANAN LAINNYA |
| 89 | 56301 | BAR |
| 90 | 56303 | RUMAH MINUM/KAFE |
| 91 | 56304 | KEDAI MINUMAN |
| 92 | 56305 | RUMAH/KEDAI OBAT TRADISIONAL |
| 93 | 56306 | PENYEDIAAN MINUMAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP |
| 94 | 85499 | JASA PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA |
| 95 | 85500 | JASA PENUNJANG PENDIDIKAN |
| 96 | 86201 | PRAKTIK DOKTER UMUM |
| 97 | 86202 | PRAKTIK DOKTER SPESIALIS |
| 98 | 86203 | PRAKTIK DOKTER GIGI |
| 99 | 50131 | ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM LINER UNTUK BARANG |
| 100 | 50212 | ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK PENUMPANG DENGAN TRAYEK TIDAK TETAP DAN TIDAK |
| 101 | 50133 | ANGKUTAN LAUT DOMESTIK KHUSUS UNTUK BARANG |

| NO. | KODE | NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA |
|-----|-------|---|
| 102 | 50215 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK PENUMPANG |
| 103 | 50142 | ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM TRAMPER UNTUK BARANG |
| 104 | 50121 | ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM LINER UNTUK PENUMPANG |
| 105 | 50229 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK BARANG TERMASUK PENYEBERANGAN |
| 106 | 50224 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARPROVINSI UNTUK BARANG |
| 107 | 50217 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG |
| 108 | 50221 | ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG UMUM DAN ATAU HEWAN |
| 109 | 50134 | ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PERINTIS UNTUK BARANG |
| 110 | 50122 | ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM TRAMPER UNTUK PENUMPANG |
| 111 | 50223 | ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG BERBAHAYA |
| 112 | 50113 | ANGKUTAN LAUT DOMESTIK KHUSUS UNTUK WISATA |
| 113 | 50135 | ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PELAYARAN RAKYAT |
| 114 | 50214 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARPROVINSI UNTUK PENUMPANG |
| 115 | 50144 | ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL PELAYARAN RAKYAT |
| 116 | 50123 | ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL KHUSUS UNTUK WISATA |
| 117 | 50228 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG |
| 118 | 50143 | ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL KHUSUS UNTUK BARANG |
| 119 | 50219 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK PENUMPANG TERMASUK PENYEBERANGAN |
| 120 | 50227 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG |
| 121 | 50225 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK BARANG |
| 122 | 50226 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG |
| 123 | 50218 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG |
| 124 | 50213 | ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU DENGAN TRAYEK TIDAK TETAP DAN TIDAK TERATUR UNTUK |
| 125 | 50112 | ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM TRAMPER UNTUK PENUMPANG |
| 126 | 50132 | ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM TRAMPER UNTUK BARANG |
| 127 | 50216 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG |
| 128 | 50211 | ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK PENUMPANG DENGAN TRAYEK TETAP DAN TERATUR |
| 129 | 50114 | ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PERINTIS UNTUK PENUMPANG |
| 130 | 50222 | ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG KHUSUS |
| 131 | 50111 | ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM LINER UNTUK PENUMPANG |
| 132 | 50141 | ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM LINER UNTUK BARANG |

S. PETUNJUK PERMOHONAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK SEBAGAI PKP BERISIKO RENDAH

1. Contoh permohonan pengembalian pendahuluan melalui SPT Masa PPN.

PT ABC dengan KLU termasuk dalam Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran PPN, dapat mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan sesuai dengan Peraturan Menteri ini melalui SPT Masa PPN. Untuk mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan tersebut, PT ABC harus mengisi formulir 1111 SPT Masa PPN pada Romawi II huruf H sebagai berikut:

- a. Pada butir 2 dipilih:

- 1) Butir 2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN, dalam hal pada Masa Pajak tersebut PKP melakukan kegiatan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4b) Undang-Undang PPN; atau
- 2) Butir 2.2 Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN, dalam hal pada Masa Pajak tersebut PKP tidak melakukan kegiatan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4b) Undang-Undang PPN.

- b. Pada butir 3 dipilih butir 3.2 Dikembalikan (restitusi) dan memilih Khusus Restitusi untuk PKP: Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan.

2. Contoh pengembalian pendahuluan yang diberikan kepada PKP meskipun kelebihan pajak hanya disebabkan karena kompensasi Masa Pajak sebelum-sebelumnya.

PT BCD dengan KLU termasuk dalam Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran PPN, menyampaikan SPT Masa PPN Masa Pajak September 2021 dengan ringkasan informasi sebagai berikut:

- a. Tidak ada Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri oleh PKP selama Masa Pajak September 2021 karena tidak ada

penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak selama Masa Pajak ..

- b. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp3.000.000.000,00 yang seluruhnya merupakan kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak Agustus 2021.

PT BCD mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan atas kelebihan pembayaran PPN sebesar Rp 3.000.000.000,00, dengan mencantumkan pilihan restitusi untuk PKP Pasal 9 ayat (4c) PPN sebagaimana dimaksud pada contoh 1 dalam SPT Masa PPN Masa Pajak September 2021.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH
NIP 19730213-199703 1 001